

SKRIPSI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
KEMISKINAN DI ACEH



Disusun Oleh:

PINDA RITA
NIM. 150604113

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Pinda Rita
NIM : 150604113
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendirikarya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 desember 2020

Yang Menyatakan,

Pinda Rita

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Aceh

Disusun Oleh:

Pinda Rita
NIM.: 150604113

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP: 197204281999031005

Pembimbing II

Ana Fitria, SE., M. Sc
NIP: 199009032019032019

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi

Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP: 197204281993031

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Aceh

Pinda Rita
NIM. 150604113

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ilmu Ekonomi

Pada Hari / Tanggal : Rabu, 6 Januari 2021 M
22 Jumadil Awal 1442 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

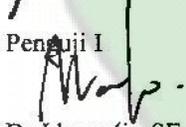
Ketua


Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP: 197204281999031005

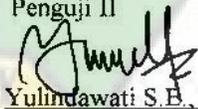
Sekretaris


Ana Fitriani, SE., M. Sc
NIP: 199009052019032019

Penguji I


Dr. Idaryani, SE., M.Si
NIDN. 0105057503

Penguji II


Yulindawati S.E., M.M
NIP. 197907132014112002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web:www.library.ar-raniry.ac.id, Email:library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Pinda Rita
Nim : 150604113
Fakultas/Program Studi : Ilmu Ekonomi
E-mail : 150604113@student.ar-raniry.ac.id

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*NonexclusiveRoyalty-FreeRight*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Aceh. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

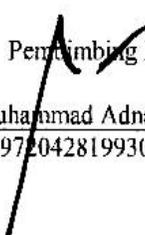
Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

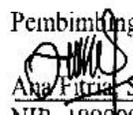
Demikian pernyataan ini yang buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 06 Januari 2021

Mengetahui :


Pinda Rita
NIM. 150604113


Pembimbing I
Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si
NIP. 197204281993031005


Pembimbing II
Ana Fitria, SE., M. Sc
NIP. 199009052019032019

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul penelitian **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Aceh”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat beserta salam tak lupa pula penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bimbingan arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si. selaku Ketua program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Marwiyati, SE., MM selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Ekonomi yang telah memberikan nasehat-nasehat, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini dan Siti Zahra, S.Ag selaku operator prodi yang telah membantu kemudahan pelaksanaan sidang.
3. Muhammad Arifin, Ph.D, selaku ketua Laboratorium.
4. Dr. Muhammad Adnan, SE., M.Si. sebagai Dosen Pembimbing 1 dan Ana Fitria, SE., M. Sc sebagai Dosen Pembimbing 2 yang dengan kesabaran beliau telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai pedoman skripsi yang ada.

5. Marwiyati. SE., MMselaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberi saran dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Kepada ayahanda tercinta Ali Akbar dan kepada ibunda tercinta Sardiyah yang telah memberikan kasih sayang yang begitu dalam membuat penulis dapat merasakan kekuatan cinta hingga saat ini. Dan kepada Erisa, Mega Wati, M.suriyani, dan Marsya Asyifa sebagai selaku keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan memberikan kasih sayang serta doa dan juga menjadi penyemangat bagi penulis.
8. Sahabat-sahabatku Sri Eida Rosalia, Rumaidah, Safwani, Maisura, Marina, Nurul Lisa, Riska Zahara, Rizka Masturah dan Bardiah terima kasih untuk waktu, perasaan dan tenaga yang telah di korbakan selama ini, semoga kita selalu bersama. Dan kepada temen-temen KPM Lampisang Tengoh yang telah mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran atau ide yang bersifat membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan umumnya dan yang terkait khususnya.

Banda Aceh, 30 desember 2020
Penulis,

Pinda Rita

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P danK
Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

TandadanHuruf	Nama	GabunganHuruf
◌َ ي	<i>Fathahdanya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathahdanwau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hau-la*

3. *Maddah*

Maddah atau panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي / َ	<i>Fathah</i> dan alifatauya	Ā
ي ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
ي ُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutoh (ة)

Transliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

- a. Ta *marbutoh* (ة) hidup
Ta *marbutoh* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutoh* (ة) mati
Ta *marbutoh* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutoh* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutoh* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl/ raudatulatfāl*
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*
طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Pinda Rita
NIM : 150604113
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Illmu Ekonomi
Judul : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Aceh
Tanggal Sidang : 6 Januari 2021
Tebal Skripsi : 80 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Adnan. SE.,M.Si
Pembimbing II : Ana Fitria, SE., M. Sc

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama negara yang sedang berkembang. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jumlah penduduk dan IPM berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh periode 2011-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari tahun 2011 -2018 bersumber dari Badan Pusat Statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel dengan data *time series* serta data *cross section*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, Secara simultan atau bersama - sama Jumlah penduduk dan IPM berpengaruh terhadap kemiskinan dengan nilai *R-square* sebesar 0,29..diharapkan kepada pemerintah lebih memperhatikan lagi sektor indeks pembangunan manusia (IPM) supaya dapat menekan dan mengurangi angka kemiskinan dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi dan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam hal menanggulangi tingkat kemiskinan di Aceh.

Kata Kunci: *Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SIDANG SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Teori Kemiskinan.....	14
2.1.1 Penyebab Kemiskinan.....	15
2.1.2 indikator kemiskinan.....	16
2.1.3 Ukuran Kemiskinan.....	18
2.2 Pengertian Jumlah Penduduk.....	20
2.2.1 Faktor-Faktor Jumlah Pendudu.....	20
2.3 Indeks Pembangunan Manusia.....	23
2.4 Hubungan Antara Variabel.....	26
2.4.1 Hubungan JP Dengan Kemiskinan.....	26
2.4.2 Hubungan IPM dengan Kemiskinan.....	28
2.5 Penelitian Terdahulu.....	29
2.6 Kerangka Pemikiran.....	35
2.7 Hipotesis.....	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	36
3.1 Rancangan Penelitian	36
3.2 Jenis Data Dan Sumber Data	36
3.3 Populasi Dan Sampel	37
3.4 Variabel Penelitian	37
3.4.1 Variabel Terkait	37
3.4.2 Variabel Bebas	38
3.5 Defini Operasional	38
3.6 Model Analisis.....	39
3.7 Teknik Analisis Data.....	40
3.7.1 Penentuan Model Estimasi.....	40
3.7.2 Tahapan Pengujian Model	41
3.8 Pengujian Hipotesis.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
4.1 Gambaran Umum.....	44
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	46
4.2.1. Kemiskinan	47
4.2.2 Jumlah Penduduk	49
4.2.3 Indeks Pembangunan Manusia.....	51
4.3 Analisis Data	53
4.3.1 Penentuan Model Estimasi.....	53
4.3.2 Uji Signifikan	56
4.3.3. Analisis Regresi Linear Berganda.....	56
4.4 Pembahasan.....	58
4.4.1 Pengaruh JP Terhadap Kemiskinan	58
4.4.2 Pengaruh IPM Terhadap Kemiskinan	61
4.4.3 Pengaruh JP dan IPM Terhadap Kemiskinan	
BAB V PENUTUP	65
5.1 Kesimpulan	65
5.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tabel Penelitian Terkait.....	32
Tabel 3.1	Devinisi Operasional	
Tabel 4.1	Wilayah Administrasi Provinsi Aceh tahun 2011-2018	45
Tabel 4.2	statistik deskriptif	46
Tabel 4.3	persen tase kemiskinan kanupaten/kota Tahun 2011-2018.....	47
Tabel 4.4	persentase jumlah penduduk kabupaten/kota tahun 2011-2018.....	49
Tabel 4.5	indeks pembangunan manusia kabupaten/kota tahun 2011-3028	51
Tabel 4.6	penentuan model estimasi.....	52
Tabel 4.7	Hasil Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange multiplie.....	53
Tabel 4.8	Hasil Estimasi Random Effect Model	54
Tabel 4.9	Uji F.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 4.1 peta provinsi Aceh.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Data Analisis Regresi Panel
- Lampiran 2 : Dara Logaritma Analisis Regresis Panel
- Lampiran 3 : Persentase Kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2011'2018
- Lampiran 4 : Jumlah Penduduk Kbupaten/Kota Tahun 2011-2018
- Lampiran 5 : Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2011-2018
- Lampiran 6 : Commont Effect Models
- Lampiran 7 : Fixed Effect Models
- Lampiran 8 : Random Effect Models
- Lampiran 9 : Uji Chow
- Lampran 10 : Uji Hausman
- Lampiran 11 : Uji Lagrange
- Lampiran 12 : Analisis Deskriptif



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, dengan ekonomi terbesar kesepuluh menurut paritas daya beli dan merupakan anggota G-20. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada maret 2020 sebanyak 26,42 juta orang yang hidup dibawah garis kemiskinan namun ada sekitar 7,38% dari seluruh penduduk masih rentan jatuh miskin, (BPS,2020).

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia, terutama negara yang sedang berkembang. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan lokasi lingkungan. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik (Putra, 2015).

Menurut Maipita (2014:62) kemiskinan secara umum disebabkan oleh dua faktor yang pertama: faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari dalam diri orang miskin tersebut, faktor eksternal adalah dari luar diri orang miskin tersebut. Faktor penyebab kemiskinan 1) pertumbuhan ekonomi lokal dan global yang rendah, 2) tingkat pendidikan dan penguasaan teknologi yang rendah, 3) sumber daya alam yang terbatas, 4) pertumbuhan penduduk yang tinggi dan stabilitas politik yang tidak kondusif.

Ada beberapa penyebabnya terjadinya kemiskinan di Indonesia menurut Kuncoro (2010) yaitu: pertama karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, kedua yaitu perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia itu sendiri, ketiga muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Menurut Spicker dalam Maipita (2014:60) menyatakan bahwa penyebab kemiskinan dibagi dalam empat mazhab yaitu: 1) *Individual Explanation*, mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan ini cenderung diakibatkan oleh karakter orang miskin tersebut. 2) *Familiar Explanation* mazhab ini berpendapat bahwa kemiskinan lebih disebabkan oleh faktor keturunan. 3) *Subcultural Explanation* yaitu disebabkan karena kultur, kebiasaan, adat-istiadat atau karakteristik perilaku lingkungan. 4) *Structur Explanation* mazhab ini menganggap bahwa kemiskinan disebabkan oleh ketidakseimbangan perbedaan status yang dibuat oleh adat

istiadat, kebijakan, dan aturan lain menimbulkan perbedaan hak untuk bekerja.

Adapun indikator kemiskinan yang digunakan secara umum yaitu tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, pemenuhan bahan pangan, melek huruf, dan distribusi pendapatan. Agar seseorang dapat hidup dengan layak, perlu adanya pemenuhan kebutuhan tersebut (Adisasmita 2015).

Ukuran kemiskinan apabila dilihat dari sudut pandang ada dua yang pertama kemiskinan absolut dan relatif. Kemiskinan absolut Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya sedangkan kemiskinan relatif Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya (Nurwati, 2018).

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Aceh merupakan wilayah daratan dengan topografi berbukit, bergunung dan berlembah. Sebagian besar lahan di daerah Aceh telah dimanfaatkan untuk pemukiman, perkebunan dan industri. Provinsi Aceh terdiri dari 23 kabupaten. Adapun pembangunan daerah Aceh telah dilakukan secara merata oleh pemerintah Aceh, hal ini terlihat dari makin membaiknya ketersediaan sarana dan prasarana yang disediakan oleh

pemerintah,tercukupinya bahan pangan dan semakin membaiknya pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, inflasi, keuangan pemerintah dan transportasi membuktikan bahwa adanya perhatian dari pihak pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan di Aceh.

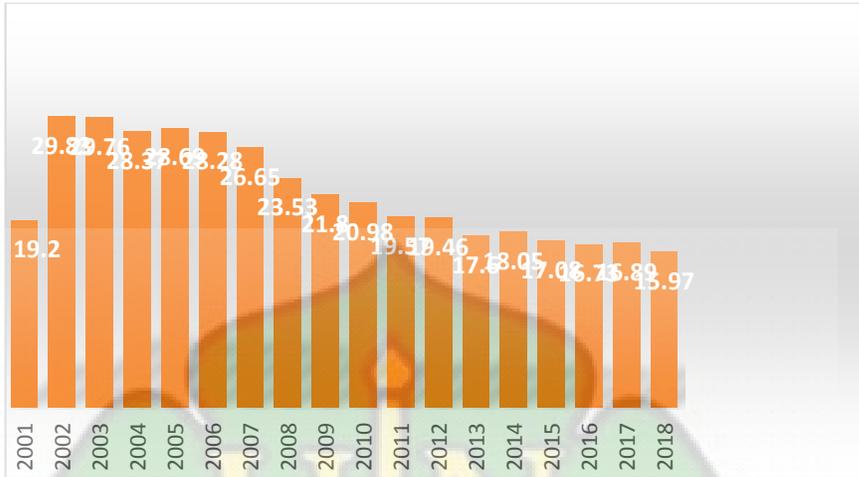
Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang juga menghadapi masalah kemiskinan.Masih banyak masyarakat Aceh yang berpendapatan rendah dan berada dibawah garis kemiskinan.Padahal Provinsi Aceh terkenal dengan banyak sumber daya alamnya yang melimpah untuk dimanfaatkan, namun sayangnya sumber daya alamnya belum bisa mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi rakyatnya.Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Setiap negara akan berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka kemiskinan. Syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia pertumbuhan ekonomi yang dicapai ternyata juga diiringi dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa angka kemiskinan di Aceh adalah yang terbesar dari seluruh provinsi yang ada di Sumatera. Data BPS Aceh merilis bahwa jumlah

penduduk miskin yang terdapat di Aceh sudah mengalami penurunan, tetapi masih tergolong sebagai penduduk dengan angka kemiskinan terbesar di Sumatera. Persentase penurunan angka kemiskinan di Aceh termasuk di urutan tertinggi pertama di Indonesia (Abid,2019).

Penurunan yang terjadi dari data diatas disebabkan oleh beberapa faktor.Masalah utama dalam kemiskinan salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ialah suatu perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat akan bertambah. Pertumbuhan ekonomi termasuk ke dalam masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan sesuatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor- faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka (Sukirno, 2012).

Berdasarkan data dari BPS, kemiskinan di Aceh mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Adapun data kemiskinan untuk provinsi Aceh yang didapatkan dari BPS dari tahun 2001-2018 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Data Badan Pusat Statistik (2019).

Gambar 1.1
Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh Tahun 2001- 2018

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas dapat disimpulkan bahwa angka kemiskinan di provinsi Aceh mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun, kemiskinan paling parah terjadi pada tahun 2002 yang mencapai 29,83%. Berdasarkan Gambar di atas terlihat bahwa angka kemiskinan dari tahun 2007 sampai 2018 angka kemiskinan mulai terjadi penurunan dari beberapa tahun ke belakang. Namun, penurunan yang terjadi belum mampu membuat angka kemiskinan di Aceh turun secara signifikan. Aceh masih tetap menjadi provinsi dengan penduduk miskin terbesar di Sumatera.

Besarnya angka kemiskinan yang terjadi pada masyarakat Aceh disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah karena

jumlah penduduk di Aceh. Jumlah penduduk merupakan salah satu penyebab besarnya angka kemiskinan di suatu provinsi, adapun beberapa hal yang akan terjadi jika angka penduduk semakin bertambah di suatu daerah adalah: (a) bertambahnya penduduk di suatu daerah maka akan semakin banyak lahan yang dibutuhkan untuk dijadikan tempat tinggal hal tersebut akan menyebabkan semakin sedikitnya lahan yang tersedia untuk tempat pertanian; (b) Semakin banyaknya polisi dan limbah yang berasal dari rumah tangga, pabrik, perusahaan dan industri; (c) Angka pengangguran semakin meningkat. (Permata, 2012).

Adapun jumlah penduduk Aceh dalam beberapa tahun terakhir ini yang didapatkan melalui data BPS dapat di paparkan melalui Gambar sebagai berikut:



Sumber: BPS (2019).

Gambar 1.2
Pertumbuhan Penduduk Provinsi Aceh Tahun 2014-2018

Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa jumlah penduduk tahun 2014-2018 di Provinsi Aceh tidak begitu *ekstrem*, terlihat pada grafik untuk tahun 2014 sampai 2015 pertumbuhan penduduk yang terjadi setiap tahunnya rata-rata sebesar 2 %, sedangkan ditahun 2018 angka pertumbuhan penduduk mengalami penurunan sebesar 0,27 % menjadi 1,84 %.

Pertambahan penduduk sangat erat kaitannya dengan kemiskinan, hal ini terjadi karena besarnya jumlah penduduk dan sempitnya kesempatan kerja merupakan akar permasalahan dari kemiskinan. Jadi, aspek demografis memiliki kaitan yang erat dan menjadi akar permasalahan dari kemiskinan. Hal ini juga dipertegas oleh pendapat Heuser yang menyatakan bahwa kemiskinan tercipta karena tidak optimalnya tenaga kerja dalam bekerja hal ini bisa disebabkan karena berbedanya latar pendidikan dan pekerjaan yang ditekuni. Perbedaan latar belakang dan pendidikan ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang masuk ke pasar kerja sehingga memaksa pencari kerja untuk secepat-cepatnya masuk ke dunia kerja akibatnya ketatnya persaingan dalam dunia kerja.

Selain karena pertambahan jumlah penduduk, salah satu faktor yang juga diduga dapat mempengaruhi kemiskinan di Aceh adalah IPM Provinsi Aceh. Feriyanto (2014) mengatakan IPM merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Selanjutnya menurut BPS, IPM adalah pengukuran perbandingan dari angka harapan

hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM merupakan proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Adapun IPM provinsi Aceh beberapa tahun terakhir ini dapat dipaparkan sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik 2019

Gambar 1.3
IPM Provinsi Aceh Tahun 2014- 2018

Berdasarkan Gambar 1.3 menunjukkan bahwa IPM dari tahun 2014 sampai tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan di Provinsi Aceh. Hal ini berarti pembangunan kualitas manusia terus meningkat setiap tahunnya. IPM yang rendah menjadi penyebab kualitas pembangunan manusia rendah sehingga pada gilirannya berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dan rendahnya pendapatan kemudian menyebabkan tingkat tabungan dan investasi turun, sehingga akumulasi dalam penciptaan modal

baru rendah dan terbatasnya lapangan kerja baru. Ini berarti akan meningkatkan jumlah pengangguran yang terjadi di masyarakat.

Adapun penelitian yang pernah dilakukan oleh Eka (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh jumlah penduduk dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hal yang sama juga disampaikan oleh Chairunnas (2016) melalui uji parsial yang telah dilakukan menunjukkan bahwa indeks pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan di Aceh.

Wahyuni (2010) menjelaskan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Menurut Fadillah menyatakan bahwa IPM berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap kemiskinan..

Segoro dan Fau menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas dan dengan melihat pada dua penyebab maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Aceh”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh?
2. Berapa besarpengaruh IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh?
3. Berapa besar pengaruh jumlah penduduk dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian pada skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui berapa besar IPMberpempengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui berapa besar jumlah penduduk dan IPMber[engaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada dua yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, memberikan informasi dan referensi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kemiskinan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam membuat dan memutuskan suatu kebijakan terkait masalah kemiskinan.

Bab II: Landasan Teori

Pada bab dua ini dijelaskan mengenai landasan teori kemiskinan, faktor yang menyebabkan kemiskinan, jumlah penduduk, IPM, temuan penelitian terdahulu, model penelitian, kerangka berpikir, dan hipotesis.

Bab III: Metode Penelitian

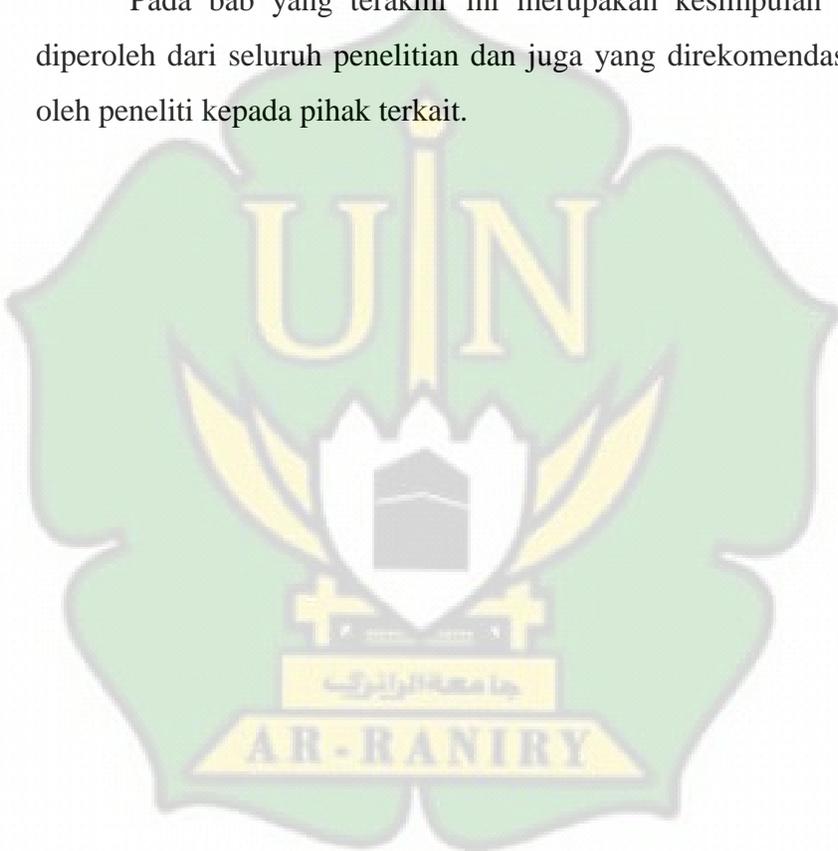
Pada bab tiga ini dijelaskan mengenai variabel penelitian, cara penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang dipakai dalam penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab empat ini meliputi deskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan atas pengolahan data.

Bab V: Penutup

Pada bab yang terakhir ini merupakan kesimpulan yang diperoleh dari seluruh penelitian dan juga yang direkomendasikan oleh peneliti kepada pihak terkait.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Teori Kemiskinan

Menurut silalahi (2014) yang dimaksud dengan kemiskinan adalah dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung (tinggal) , pendidikan dan kesehatan kemudian kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan perkerjaan.

Selanjutnya kuncoro (2010) mengatakan Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu: Pertama, kemiskinan absolut dimana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relative yaitu pangsa pendapatan nasional yang diteri oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata la kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan

Menurut peraturan presiden Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, pemahaman mengenai “kemiskinan” mestilah beranjak dari pendekatan berbasis hak (*right based approach*). Dalam pemahaman harus diakui bahwa seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak-hak yang sama. Sehingga apabila ada sekelompok laki-lakiatau perempuan tidak terpenuhinya

suatu kebutuhan hidup minimunnya maka dia dikatakan sebagai masyarakat miskin (Dwihapsari, 2017).

Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi (*consumption-based poverty line*) terdiri dari dua elemen, yaitu: (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya, dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagian pertama relatif jelas. Biaya untuk mendapatkan kalori minimum dan kebutuhan lain dihitung dari melihat harga-harga makanan yang menjadi menu golongan miskin. Sedangkan elemen kedua sifatnya lebih subyektif (Kuncoro, 2010).

Selanjutnya Nurkse dalam Sukirno (2006) berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan pada masa lalu tetapi juga menghadirkan hambatan kepada pembangunan di masa yang akan datang. Nurkse juga mengatakan bahwa lingkaran perangkap kemiskinan yang terpenting adalah keadaan-keadaan yang menyebabkan timbulnya hambatan terhadap terciptanya tingkat pembentukan modal yang tinggi. Berikutnya Siahaan (2004) mengemukakan bahwa kemiskinan berarti sebuah kondisi sosial yang kebutuhan dasarnya pun tidak mencukupi dari hari kehari, pangan yang sulit dicapai, gizi yang tidak memadai, air yang tidak sesuai dengan syarat kualitas kesehatan, sulitnya perumahan, rendahnya tingkat

pendidikan, pengangguran, pelayanan-pelayanan sosial yang jauh tidak memadai, transportasi yang tidak lancar dan lain-lainnya.

Berdasarkan definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang mempunyai pendapatan yang rendah sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya

2.1.1 Penyebab Kemiskinan

Ada beberapa sebab-sebab kemiskinan yaitu pertama, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia ini, karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal (Kuncoro, 2010).

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermula pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan

dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan. Ragnar Nurkse adalah seorang ekonom pembangunan ternama yang mengatakan: *“a poor country is poor because it is poor”* (negara miskin itu karena dia miskin) (Kuncoro, 2010).

2.1.2 Indikator Kemiskinan

Indikator-indikator kemiskinan yang digunakan secara umum adalah tingkat upah, pendapatan, konsumsi, mortalitas anak usia balita, imunisasi, kekurangan gizi anak, tingkat fertilitas, tingkat kematian ibu, harapan hidup rata-rata, tingkat penyerapan anak usia sekolah dasar, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, pemenuhan bahan pangan, air bersih, perkembangan penduduk, melek huruf, urbanisasi, pendapatan perkapita dan distribusi pendapatan. Agar seseorang dapat hidup dengan layak, perlu adanya pemenuhan kebutuhan tersebut (Adisasmita 2015).

Untuk memperjelas gambaran dan ciri-ciri kemiskinan, berikut ini ciri-ciri kemiskinan sebagai berikut (Siahaan 2014):

1. Sebagian besar masyarakatnya hidup di perdesaan, terdiri dari buruh tani (petani penyewa tanah).
2. Sebagai penganggur atau setengah penganggur, meskipun bekerja tetapi sifatnya tidak teratur dan tidak mencukupi bagi kebutuhan hidup yang wajar. Ini terdapat di perdesaan atau di perkotaan.

3. Berusaha sendiri dan dengan menyewa peralatan orang lain dengan modal yang kecil dan serba terbatas, banyak didapati di kota dan ada juga di perdesaan.

Menurut Todaro (2016), kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang akibat dari interaksi antara 6 karakteristik berikut

- a. Tingkat pendapatan nasional negara-negara berkembang terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya tergolong lambat.
- b. Pendapatan perkapita negara-negara berkembang juga masih rendah dan pertumbuhannya sangat lambat, bahkan ada beberapa yang mengalami stagnasi.
- c. Distribusi pendapatan sangat timpang atau sangat tidak merata.
- d. Mayoritas penduduk di negara-negara berkembang harus hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
- e. Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi dan banyaknya wabah penyakit sehingga tingkat kematian bayi di negara-negara berkembang sepuluh kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di negara maju.
- f. Fasilitas pendidikan di kebanyakan negara-negara berkembang maupun isi kurikulumnya relatif masih kurang relevan maupun kurang memadai

2.1.3 Ukuran kemiskinan

Menurut Nunung Nurwati (2008), kemiskinan memiliki banyak definisi dan sebagian besar sering mengaitkan konsep kemiskinan dengan aspek ekonomi. Berbagai upaya untuk mendefinisikan kemiskinan dan mengidentifikasi kemiskinan sebenarnya menghasilkan suatu konsep pemikiran yang dapat disederhanakan. Pertama dari sudut pandang maka pengukuran kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Kemiskinan Absolut Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.
2. Kemiskinan Relatif Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar

hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.

Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

Ukuran garis kemiskinan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan pendekatan kemiskinan oleh Suyogyo (2000). Diukur dengan menghitung jumlah penduduk yang memiliki pendapatan per kapita yang tidak mencukupi untuk mengkonsumsi barang dan jasa yang nilainya ekuivalen dengan 20 kg per kapita perbulan untuk daerah pedesaan dan 30 kg beras untuk daerah perkotaan. Standar kecukupan pangan dihitung selama 2.100 kilo kalori per kapita per hari ditambah dengan pengeluaran untuk kebutuhan non makanan (perumahan, berbagai barang dan jasa, pakaian).

2.2. Pengertian Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dalam perencanaan wilayah. Jumlah penduduk adalah faktor utama untuk menentukan banyaknya permintaan bahan

konsumsi yang perlu disediakan, begitu juga banyaknya fasilitas umum yang perlu dibangun di suatu wilayah (Tarigan, 2015).

Menurut Badan Pusat Statistik (2014), penduduk adalah mereka yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan definisi-definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal di daerah tersebut dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan terdaftar dalam data penduduk di daerah tersebut.

2.2.1 Faktor-faktor Jumlah Penduduk

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk, yaitu Fertilitas (kelahiran), Mortalitas (kematian) dan Migrasi (perpindahan penduduk) (Ajie 2018).

a. Fertilitas (Kelahiran)

Fertilitas merupakan performa seseorang wanita melahirkan jumlah bayi hidup. Dalam penafsirannya orang cenderung menyamakan antara konsep fertilitas dengan fekunditas, padahal fekunditas merupakan kemampuan biologis seorang wanita melahirkan bayi hidup. Fekunditas adalah lawan dari steril atau mandul. Persamaan fertilitas dengan fekunditas adalah selalu dikaitkan dengan masa reproduksi wanita. Masa reproduksi wanita dimulai sejak datangnya menstruasi pertama sampai pada menopause.

b. Mortalitas (Kematian)

Mortalitas atau kematian merupakan aspek kajian kependudukan yang sangat penting dalam menyusun suatu program kesehatan. Mati adalah keadaan menghilangnya semua tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Data mengenai kematian sangat diperlukan antara lain untuk proyeksi penduduk guna perencanaan pembangunan, misalnya perencanaan pemberdayaan ekonomi, fasilitas perumahan, dan lainnya. Data kematian juga diperlukan untuk menilai keberhasilan program-program kebijaksanaan penduduk.

c. Migrasi

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah yang lain atau dari suatu negara ke negara yang lain. Penduduk yang datang ke daerah baru disebut imigran, sedangkan penduduk yang pindah ke daerah baru atau yang keluar dari suatu daerah disebut emigran.

Tren fertilitas dan mortalitas secara kuantitatif, tingkat pertumbuhan penduduk (*rate of population increase*) diukur sebagai persentase pertambahan (pengurangan) relatif neto dari jumlah penduduk pertahun karena pertumbuhan alamiah (*natural increase*) dan migrasi internasional neto (*net international migration*). Pertumbuhan karena sebab alamiah hanya mengukur selisih jumlah kelahiran dan kematian, atau dalam terminologi yang lebih teknis, pertumbuhan alamiah menunjukkan selisih antara tingkat fertilitas dan tingkat mortalitas (Todaro & Smith, 2009).

Masalah jumlah penduduk yang sangat besar. Hal ini dapat menimbulkan beberapa masalah pada usaha-usaha pembangunan karena, disatu pihak jumlah penduduk yang sangat tinggi akan menimbulkan perkembangan tenaga kerja yang hampir sama cepatnya. Dilain pihak, kemampuan negara menciptakan kesempatan kerja yang baru sangat terbatas. Sebagai akibat kedua keadaan yang bertentangan itu, jumlah penduduk menimbulkan masalah pembangunan.

Di negara berkembang jumlah penduduk yang sangat besar jumlahnya menambah kerumitan masalah pembangunan. Dapat dikatakan bahwa masalah penduduk merupakan salah satu masalah pembangunan yang paling utama dan paling sukar diatasi. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan untuk mempercepat lajunya perkembangan ekonomi menurut para ahli adalah dengan pengurangan tingkat jumlah penduduk di negara berkembang. Akan tetapi sampai sekarang hasil usaha ini belum dapat dikatakan berhasil usaha-usaha mengurangi jumlah penduduk menghadapi beberapa masalah ekonomi, sosial-budaya, keagamaan, politik, dan psikologi sehingga menimbulkan kesukaran untuk mengurangi jumlah penduduk yang tinggi tersebut dengan baik dan dalam kurun waktu yang relatif singkat (Sukirno, 2006).

2.3 Indeks pembangunan Manusia (IPM)

Natasya (2019) Indeks pembangunan manusia merupakan indikator strategis yang banyak digunakan untuk melihat upaya dan kinerja program pembangunan secara menyeluruh di suatu wilayah.

Dalam hal ini IPM dianggap sebagai gambaran dari hasil program pembangunan yang telah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Demikian juga kemajuan program pembangunan dalam suatu periode dapat diukur dan ditunjukkan oleh besaran IPM pada awal dan akhir periode tersebut.

Morris mengenalkan *Physical Quality of Life Index* (PQLI) atau Indeks Kualitas Hidup (IKH) untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. *United Nation for Development Program* (UNDP) mengembangkan suatu indeks yang sekarang dikenal dengan istilah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (*Human Development Index*) sejak tahun 1990. Indikator-indikator yang digunakan untuk menyusun indeks ini adalah:

- (1) tingkat harapan hidup,
- (2) tingkat melek huruf masyarakat, dan
- (3) pendapatan *real* per kapita berdasarkan daya beli masing-masing negara.

Menurut (Todaro & Smith, 2009) yang mencoba merangking IPM ke dalam 4 bagian dengan rincian:

1. Pembangunan manusia rendah, IPM berkisar antara 0,00 sampai 0,499
2. Pembangunan manusia rendah, IPM berkisar antara 0,50 sampai 0,799
3. Pembangunan manusia rendah, IPM berkisar antara 0,80 sampai 0,90

4. Pembangunan manusia rendah, IPM berkisar antara 0,90 sampai 1,0

Salah satu manfaat utama IPM adalah untuk menunjukkan bahwa suatu negara sesungguhnya dapat bekerja jauh lebih baik sekalipun tingkat pendapatannya rendah. Sebaliknya, tingkat pendapatan yang tinggi tidak selamanya diikuti dengan capaian pembangunan manusia yang tinggi pula. Selain itu IPM menunjukkan bahwa pembangunan yang sesungguhnya berarti pembangunan manusia dalam arti luas, bukan hanya sekedar pendapatan yang lebih tinggi. Banyak negara, seperti negara-negara produsen minyak dengan pendapatan tinggi, telah dinyatakan mengalami pertumbuhan tanpa pembangunan. Kesehatan dan pendidikan adalah input masukan bagi fungsi produksi nasional dalam peranannya sebagai komponen modal manusia (*human capital*) yang berarti investasi produktif dalam sumber daya manusia. Peningkatan kesehatan dan pendidikan merupakan tujuan tersendiri yang penting dari upaya pembangunan. Dengan demikian, indikator yang lebih baik untuk menunjukkan perbedaan dan peringkat pencapaian pembangunan adalah memasukkan variabel kesehatan dan pendidikan dalam ukuran kesejahteraan tertimbang (*weighted wellbeing measure*) (Todaro & Smith, 2009).

Davies dan Quinlivan (2006) berpendapat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM mengukur pencapaian rata-

rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia yaitu : 1. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran. 2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa dan kombinasi pendidikan dasar, menengah atau gross enrollment ratio. 3. Standar kehidupan yang layak diukur dengan GDP per kapita produk domestik bruto dalam paritas kekuatan beli.

IPM menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas manusia, yaitu : 1. IPM menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya seperti dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. 2. IPM digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja daerah, khususnya dalam hal evaluasi terhadap pembangunan kualitas hidup masyarakat/penduduk. 3. Meskipun dapat menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan kualitas hidup manusia, tetapi IPM belum tentu mencerminkan kondisi sesungguhnya namun untuk saat ini merupakan satu-satunya indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan kualitas hidup manusia.

2.4 Hubungan Antar Variabel

2.4.1 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Kemiskinan

Tingginya tingkat kelahiran berarti bahwa tenaga kerja aktif harus menghidupi jumlah anak yang hampir dua kali lipat lebih besar secara proporsional dibandingkan yang ditanggung tenaga kerja aktif. Orang-orang lanjut usia (lansia) dan anak-anak sering diacu sebagai beban ketergantungan (*dependency burden*) ekonomi dalam arti mereka harus mendapat dukungan finansial dari angkatan kerja di negaranya (biasanya didefinisikan sebagai warga negara berusia 15 sampai 64 tahun). Berbeda dengan negara berkembang para lansia di negara-negara kaya menjalani masa tua mereka dengan tabungan mereka serta dari tunjangan pensiun dari negara dan swasta. Sebaliknya, dukungan dana publik yang tersedia bagi anak-anak sangat terbatas di negara-negara berkembang. Dengan demikian, tampak jelas bahwa masalah ketergantungan menimbulkan dampak besar di negara-negara berkembang. Umumnya, semakin cepat laju pertumbuhan penduduk semakin besar pula jumlah anak-anak yang harus ditanggung total penduduk, dan semakin berat pula tanggungan orang-orang yang bekerja guna menopang mereka (Todaro & Smith, 2009).

Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan suatu lapangan pekerjaan yang dapat menampung jumlah pencari kerja

yang meningkat akan menyebabkan peningkatan pengangguran. Pertumbuhan penduduk yang berarti juga peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja apabila tidak diikuti dengan luasnya kesempatan kerja berakibat pada ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya menyebabkan terjadinya kelangkaan sumber daya. Akibatnya, dalam upaya pemenuhan kebutuhannya terjadi kompetisi sampai pada akhirnya terjadi kenaikan harga kebutuhan. Kondisi ini menyebabkan daya beli masyarakat berkurang.

Penelitian Angga tri Widiastuti (2016) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Dan penelitian Hamzah 2018 mengatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

2.4.2 Hubungan IPM dengan Kemiskinan

Komponen Indeks Pembangunan Manusia salah satunya pendidikan dan kesehatan adalah tujuan pembangunan yang mendasar. Kesehatan sangat penting artinya bagi kesejahteraan dan pendidikan bersifat esensial bagi kehidupan yang memuaskan dan berharga. Keduanya sangat penting dalam kaitannya dengan gagasan lebih luas mengenai peningkatan kapabilitas manusia sebagai inti makna pembangunan yang sesungguhnya. Hal ini juga dipertegas oleh (Feriyanto, 2014) mengatakan indeks pembangunan manusia merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

Pada saat yang sama, pendidikan memainkan peran penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu kesehatan adalah prasyarat bagi peningkatan produktifitas dan pendidikan yang berhasil juga bergantung pada kesehatan yang memadai. Dengan demikian kesehatan dan pendidikan merupakan input bagi fungsi produksi supaya mampu mengembangkan kapasitas suatu Negara.

Penelitian widiastuti (2016), menemukan bahwa IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Oleh karena itu IPM patut menjadi pertimbangan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sedangkan menurut Wulandari (2018) menjelaskan bahwa IPM berpengaruh negative terhadap kemiskinan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Saputra (2011) meneliti tentang “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, PDRB berpengaruh negatif

dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, dan Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

2. Fadillah, Sukiman dan Dewi (2016) meneliti tentang analisis pengaruh pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, IPM, dan pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, IPM, dan pertumbuhan penduduk terhadap kemiskinan. Cakupan penelitian ini adalah seluruh kabupaten di Provinsi di Jawa Tengah yaitu 29 kabupaten, dengan data time series tahun 2009-2013 dengan jumlah keseluruhan 290 data panel. Dari regresi data panel dapat diketahui bahwa pendapatan per kapita berpengaruh signifikan secara negatif terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Sedangkan untuk IPM juga memiliki pengaruh secara signifikan negatif terhadap kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka juga memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan. Pertumbuhan penduduk secara parsial tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.
3. Segoro dan Pou (2016) meneliti tentang analisis Pengaruh Produk Domestic Regional Bruto (PDRB), inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pengangguran terhadap

kemiskinan di Indonesia tahun 2009-2012. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, inflasi, IPM, dan pengangguran terhadap kemiskinan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan variabel kemiskinan sebagai variabel dependen (terikat) sedangkan untuk variabel independennya (bebas) PDRB, inflasi, IPM, dan pengangguran. Metode Analisis menggunakan Uji asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Heterokedastisitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi), Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F), Uji Regresi dan Koefisien Determinasi R^2 . Hasil dari penelitian ini menyatakan tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel PDRB terhadap kemiskinan. Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan

Dari kajian pustaka yang telah disebutkan di atas dapat menjadi kerangka acuan penelitian, kajian pustaka dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian yang Terkait

Nama Penulis	Variabel dan Metode Penelitian	Hasil Penelitian
<p>Pengaruh PDRB dan IPM terhadap kemiskinan di Indonesia, Wahyudi (2010)</p>	<p>Y: Kemiskinan X: PDRB dan IPM Metode penelitian Regresi data panel</p>	<p>PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.</p>
<p>Pengaruh inflasi, tingkat pendidikan dan investasi terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, Endrayani dan Dewi (2016)</p>	<p>Y: Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran X₁: Inflasi, Tingkat Pendidikan, dan Investasi Metode penelitian Path analysis</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. 2. Inflasi dan investasi berpengaruh meningkatkan kemiskinan. 3. Secara tidak langsung inflasi berpengaruh menurunkan kemiskinan melalui pengangguran. 4. Tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pengangguran. 5. Investasi berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pengangguran baik secara langsung maupun tidak langsung melalui

Tabel 2.1- Lanjutan

		intervening yaitu pengangguran.
Pengaruh Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran, IPM, dan Pertumbuhan terhadap kemiskinan, Fadillah, Sukiman, dan Dewi (2016)	Y: Kemiskinan X: Pendapatan Per Kapita, Tingkat Pengangguran, IPM, dan Pertumbuhan Metode penelitian Regresi data panel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Per Kapita berpengaruh signifikan secara negatif terhadap kemiskinan. 2. IPM berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. 3. Tingkat pengangguran berpengaruh signifikan positif terhadap kemiskinan. 4. Pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh terhadap kemiskinan
Pengaruh PDRB, Inflasi, IPM, dan Pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat, Segoro dan Pou (2016)	Y: Tingkat Kemiskinan X: PDRB, Inflasi, IPM, dan Pengangguran Metode Penelitian Regresi data panel	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. 2. Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 3. IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 4. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan

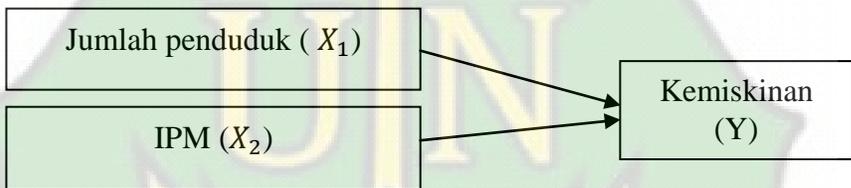
Sumber: Data Diolah (2019).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan variabel pertumbuhan penduduk dan IPM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada variabel penelitiannya dan lokasi penelitiannya. Adapun lokasi penelitian pada penelitian terdahulu berada di luar Aceh, sementara peneliti melakukan penelitian pada provinsi Aceh. Selain itu, perbedaan penelitian ini

dengan penelitian terdahulu adalah ada beberapa variabel yang digunakan berbeda dengan variabel-variabel yang peneliti pilih dalam penelitian ini.

2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori di atas, maka dapat disusun suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:



Sumber: Data Diolah (2019).

Gambar 2.1
Skema Kerangka Berpikir

Dalam gambar di atas menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kemiskinan, variabel IPM juga berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kemiskinan dan yang terakhir. Kedua variabel bebas tersebut sama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kemiskinan.

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka dikemukakan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H_1 Pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

H_2 IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.

H_3 Jumlah penduduk dan IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang tergolong dalam pendekatan eksplanasi. Penelitian kuantitatif yaitu data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Penelitian eksplanasi adalah penelitian yang berusaha menjelaskan kedudukan variable-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variable dengan variable yang lain (Sugiyono, 2018). Penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan antar variabel yang mempengaruhi kemiskinan di Aceh.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian secara tidak langsung yang diperoleh melalui media perantara. Data sekunder yang digunakan berbentuk data panel. Data panel yaitu data kombinasi antara data runtut waktu (*time series*) dan data dari beberapa obyek dalam satu waktu (*cross section*) (Arifianto, 2012). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data dalam penelitian ini yaitu data jumlah penduduk, data indeks pembangunan manusia (IPM) dan data kemiskinan tahun 2011-2018.

Adapun jumlah observasi dalam penelitian ini berjumlah 24 kabupaten dengan jenjang waktu 8 tahun. Sehingga jumlah observasi dalam penelitian ini sebanyak

$23 \times 8 = 184$.

3.3 Populasi dan Sampel

Menurut Sudjana (2005) Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil perhitungan ataupun mengukur, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang dipelajari sifat-sifatnya. Adapun yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah seluruh data kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang datanya dimuat di BPS.

Adapun yang dimaksud dengan Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Nana, 2010). Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah data jumlah penduduk dan IPM dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang datanya dimuat di BPS. Data-data dari 23 kabupaten ini akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

3.4 Variabel Penelitian

3.4.1 Variabel Terikat (*Dependen*)

Variabel terikat (*dependen*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. Karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2018). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kemiskinan (Y), yang diperoleh yaitu dari data kemiskinan di Aceh.

3.4.2 Variabel Bebas (*Independen*)

Variabel bebas (*independen*) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya dan timbulnya variabel terikat (*dependen*) (Sugiyono, 2018). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum melakukan analisis, instrumen serta sumber pengukurannya berasal dari mana Definisi operasional pada penelitian ini sebagai berikut:

Adapun definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan (Y) adalah Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2016) Jumlah Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dengan satuan persen. Jumlah Penduduk (X_1) adalah keseimbangan antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi pertumbuhan penduduk. data yang digunakan adalah jumlah penduduk Aceh pada tahun 2011-2018 dalam ribuan jiwa.
2. IPM (X_2) Adalah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, data yang digunakan adalah

persentase Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Aceh pada tahun 2011-2018 dengan satuan persen. .

2.6 Model Analisis

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) yang pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel *dependen* (terikat) dengan satu atau lebih variabel *independen* (bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi atau melihat pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Model dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut (Maghfirah, 2018):

$$Y = \alpha + \beta_1 JP_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \varepsilon \dots \dots \dots (3.1)$$

Dimana:

- Y : Kemiskinan (%)
- α : Konstanta
- PE : Jumlah penduduk (%)
- IPM : Indeks pembangunan manusia (%)
- β_1, β_2 : Koefisien regresi
- ε : Besaran nilai residu (*standar error*)
- i* : kabupaten/kota (*cross section*)
- t* : Waktu (*time series*)

2.7 Teknik Analisis Data

Menurut jenis data dan hipotesis sangat menentukan dalam ketepatan pemilihan statistik alat uji. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan tahapan analisis sebagai berikut:

1. Melakukan pemilihan model estimasi dengan melakukan pengujian *chow-test*, *Hausman-test* dan *langrange multiplier-test*.
2. Melakukan uji hipotesis yaitu analisis regresi linier berganda, yang harus memenuhi kriteria yaitu, uji F-test dan uji T-test.

2.7.1 Penentuan Model Estimasi

Penelitian ini menggunakan estimasi model yang menggunakan data panel dapat dilakukan dengan tiga model yaitu (Ajija, Sari, & dkk, 2010) :

1. Metode *Pooled Least Square (Common Effects)*

Common effect Model yaitu teknik regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara mengkombinasi data *time series* dengan data *cross section*. Model ini tidak memperhatikan dimensi waktu dan individu, sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama halnya dengan model *Ordinary Least Square (OLS)* karena menggunakan kuadrat terkecil. Persamaan modelnya sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 + \beta_2 + \beta_3 X_{it} + \beta_2 X_{it} + \dots + \varepsilon_{it} + \mu_{it} \dots \dots \dots (3.2)$$

2. Metode *Least Squares Dummy Variabel (Fixed Effects)*

Fixed Effects Model mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effects* menggunakan teknik *variable dummy* untuk menunjukkan perbedaan antar objek meskipun dengan koefisien regresor yang sama. Model ini merupakan model yang mengasumsikan koefisien *slope* konstan tetapi *intersep* bervariasi antar anggota panel. Persamaan modelnya sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 D_{it} + \dots + \varepsilon_{it} + \mu_{it} \dots \dots \dots (3.3)$$

3. Metode *Generalized Least Square (Random Effects)*

Random Effects Model mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan individu. Pada model ini perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing variabel. Keuntungan menggunakan model ini yaitu dapat menghilangkan heterokedastisitas, model ini juga disebut dengan *Error Component Model (ECM)*. Persamaan model sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_1 + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \dots + \varepsilon_{it} + \mu_{it} \dots \dots \dots (3.4)$$

3.7.2. Tahapan Pengujian Model

Keputusan pemakaian *common effect model*, *fixed effect model* ataupun *random effect model* ditentukan dengan uji *chow* dan uji *hausman test*, dengan ketentuan sebagai berikut (Subanti, 2014):

1. Uji *chow* digunakan untuk melihat model manakah yang lebih tepat, model *common effect* atau model *fixed effect* model dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *fixed effect Model*

Jika nilai *prob.* > 0.05 (H_0 diterima)

Jika nilai *prob.* < 0.05 (H_0 ditolak)

2. Uji *housman* dilakukan dengan tujuan untuk melihat manakah yang lebih tepat antara *fixed effect* model atau *random effect* model dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_1 : *fixed effect Model*

Jika nilai *prob.* > 0.05 (H_0 diterima)

Jika nilai *prob.* < 0.05 (H_0 ditolak)

3. Uji *Lagrange Multiplier* dilakukan untuk memilih antara model *common effect* atau *random effect* dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect Model*

H_1 : *Random Effect Model*

Jika nilai *prob.* > 0.05 (H_0 diterima)

Jika nilai *prob.* < 0.05 (H_1 ditolak)

2.8 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian guna melihat apakah hasil yang diperoleh sama dengan

hipotesis yang di kemukakan dalam penelitian ini, dalam pengujian hipotesis ini terdapat dua uji yaitu sebagai berikut (Ghazali, 2016):

1. Uji Parsial (t-Statistik)

Uji t-Statistik pada dasarnya untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individu dalam menerangkan variabel terikat. Kriteria pengujian yang digunakan pada tingkat $\alpha = 5\%$ sebagai berikut:

- a) Jika nilai *prob.* $< 0,05$ maka H_0 ditolak, dapat disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
- b) Jika nilai *prob.* $> 0,05$ maka H_0 diterima, variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

2. Uji F-Statistik

Uji F-Statistik dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini dilakukan hipotesa sebagai berikut:

- a) Jika nilai *prob* F hitung $< 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya secara bersama-sama ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Jika nilai *prob* F hitung $> 0,05$ maka H_0 diterima, artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

Provinsi Aceh memiliki luas 5.677.081 ha. Secara geografis, Provinsi Aceh terletak antara $01^{\circ} 58' 37,2''$ – $06^{\circ} 04' 33,6''$ Lintang Utara dan $94^{\circ} 57' 57,6''$ – $98^{\circ} 17' 13,2''$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Provinsi Aceh memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Batas Selatan: Provinsi Sumatera Utara, Batas Barat: Samudera Indonesia (Pemerintah Aceh, 2020).



GAMBAR 4.1
Peta Provinsi Aceh

Secara administratif, Provinsi Aceh terdiri dari 23 pemerintah kabupaten dan 5 pemerintah kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah kabupaten dan kota membawahi pemerintah kecamatan dan desa/kelurahan. Pemerintah kabupaten/kota tersebut sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Kabupaten/Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas Total Area (Km ² /Sq.Km)
Simeulue	Sinabang	2.051.48
Aceh Singkil	Singkil	2.185.00
Aceh Selatan	Tapak Tuan	3.841.60
Aceh Tenggara	Kutacane	4,231.43
Aceh Timur	Idi Rayeuk	6.286.01
Aceh Tengah	Takengon	4.318.39
Aceh Barat	Meulaboh	2.927.95
Aceh Besar	Kota Jantho	2.969.00
Pidie	Sigli	3.086.95
Bireun	Bireun	1.901.20
Aceh Utara	Lhoksukon	3.236.86
Aceh Barat Daya	Blangpidie	1.490.60
Gayo Lues	Blang Kejeren	5.719.58
Aceh Tamiang	Karang Baru	1.956.72
Nagan Raya	Suka Makmue	3.363.72
Aceh Jaya	Calang	3.812.99
Bener Meriah	Simpang Tiga Redelong	1.454.09
Pidie Jaya	Meuredu	1.073.60
Banda Aceh	-	61.36
Sabang	-	153.00
Langsa	-	262.41
Lhoksemawe	-	181.06
Subussalam	-	1.391.00

Sumber: Badan Pusat Statistik(2020).

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi sekilas tentang variabel penelitian yang dapat digunakan untuk mengetahui variabel penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan nilai statistik deskriptif variabel jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia dan kemiskinan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

	Kemiskinan	Jumlah Penduduk	IPM
Mean	1735.083	11.95652	6830.174
Median	1812.000	12.00000	6758.000
Maximum	2776.000	13.00000	8437.000
Minimum	7.250000	5.000000	5934.000
Std. Dev.	505.4830	0.934032	499.3721

Sumber: data diolah (2020).

4.2.1 Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan variabel terikat pada penelitian ini. Pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada rasio gini. Berdasarkan Tabel 4.2 dari 184 sampel diperoleh nilai rata-rata (*mean*) kemiskinan adalah sebesar 1735.083 dan tingkat kemiskinan maksimum sebesar 2776.000. Sementara tingkat kemiskinan minimum sebesar 7.250000. Standar deviasi pada tingkat kemiskinan dalam penelitian ini sebesar 505.4830. Berikut data tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

Tabel 4.3
Persentase Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
Tahun 2011-2018

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Simeulue	22,96	21,88	20,57	19,92	20,43	19,93	20,20	19,78
Aceh Singkil	18,93	17,92	18,73	17,77	21,72	21,6	22,11	21,25
Aceh Selatan	15,52	14,81	13,44	12,79	13,24	13,48	14,07	14,01
Aceh Tenggara	16,39	15,64	14,39	13,75	14,91	14,46	14,86	14,29
Aceh Timur	18,01	17,19	16,59	15,88	15,85	15,06	15,25	14,49
Aceh Tengah	19,58	18,78	17,76	16,99	17,51	16,64	16,84	15,58
Aceh Barat	23,81	27,76	23,7	22,97	21,46	20,36	20,28	19,31
Aceh Besar	18,36	17,6	16,88	16,13	15,93	15,55	15,41	14,47
Pidie	23,19	22,12	21,12	20,29	21,18	21,25	21,43	20,47
Bireun	19,06	18,21	17,65	16,94	16,94	15,95	15,87	14,31
Aceh Utara	22,89	21,89	20,34	19,58	19,2	19,46	18,43	18,27
Aceh Barat Daya	19,49	18,51	18,92	17,99	18,25	18,03	18,31	17,10
Gayo Lues	23,38	22,31	22,32	21,43	21,95	21,86	21,97	20,70
Aceh Tamiang	17,49	10,7	15,13	14,58	14,57	14,51	14,64	14,21
Nagan Raya	23,38	22,27	21,75	20,85	20,13	19,25	19,34	18,97
Aceh Jaya	19,80	18,3	17,53	16,52	15,93	15,01	14,85	14,16
Bener Meriah	25,50	24,5	23,47	22,45	21,55	21,43	21,14	20,23
Pidie Jaya	25,43	24,35	22,7	21,78	21,4	21,18	21,82	20,17
Banda Aceh	9,08	8,65	8,03	7,78	7,72	7,41	7,44	7,25
Sabang	21,31	20,51	18,31	17,02	17,69	17,33	17,66	16,31
Langsa	14,66	13,93	12,62	12,08	11,62	11,09	11,24	10,79
Lhoksemawe	13,73	13,06	12,47	11,93	12,16	11,98	12,32	11,81
Subussalam	23,85	12,64	20,69	19,72	20,39	19,51	19,71	18,51

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020).

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dari tahun 2011-2018 mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat salah satunya pada Kota Sabang dimana pada tahun 2011

persentase kemiskinan yaitu sebesar 21,31 persen, kemudian tahun 2015 tingkat kemiskinan menurun yaitu sebesar 17,69 persen. Pada tahun 2018 tingkat kemiskinan Kota Sabang kembali menurun yaitu sebesar 16,31 persen. Kabupaten tertinggi tingkat kemiskinan yaitu kabupaten Aceh Singkil yaitu sebesar 21,25 persen, selanjutnya Kabupaten Gayo Lues dengan tingkat kemiskinan sebesar 20,79 persen. Tingkat kemiskinan terendah ditempati oleh Kota Banda Aceh yaitu sebesar 7,25 persen.

4.2.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan salah satu variabel bebas dalam penelitian ini. Pengukuran jumlah penduduk didasarkan pada pengukuran jumlah angka kelahiran. Berdasarkan Tabel 4.4 dari 184 sampel diperoleh nilai rata-rata (*mean*) jumlah penduduk adalah sebesar 11956 jiwa dan jumlah penduduk maksimum sebesar 12.000 jiwa. Sementara jumlah penduduk minimum sebesar 5.000 jiwa. Standar deviasi pada jumlah penduduk dalam penelitian ini sebesar 0.9340. Berikut data jumlah penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun
2011-2018

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Simeulue	83,006	84,722	86,206	87,598	89,117	90,291	91,372	92,393
Aceh Singkil	105,174	107,697	110,108	112,161	114,518	116,712	119,490	121,681
Aceh Selatan	207,971	212,612	216,994	220,971	224,897	228,608	231,490	235,115
Aceh Tenggara	184,173	187,276	192,013	196,249	200,014	204,468	208,481	212,417
Aceh Timur	370,276	378,424	386,212	394,933	402,976	411,279	419,594	427,567
Aceh Tengah	180,230	183,792	188,214	192,204	196,090	200,412	204,273	208,505
Aceh Barat	178,173	181,886	185,903	190,244	193,791	197,921	301,682	205,971
Aceh Besar	361,290	369,134	376,491	384,618	392,584	400,913	409,109	417,302
Pidie	389,529	397,590	404,817	410,580	418,882	425,974	432,599	439,131
Bireuen	400,027	408,608	417,289	423,397	435,300	443,492	453,224	461,726
Aceh Utara	544,789	555,746	565,370	572,961	585,892	593,492	602,554	611,435
Aceh Barat Daya	129,708	132,612	136,370	138,140	140,689	143,312	145,726	148,111
Gayo Lues	81,604	83,189	84,717	86,262	87,881	89,500	91,0246	92,608
Aceh Tamiang	258,896	264,167	269,007	272,228	278,324	282,921	287,007	291,112
Nagan Raya	143,718	146,386	149,397	152,352	155,070	158,223	161,329	164,483
Aceh Jaya	78,984	80,573	82,385	86,123	86,385	87,622	89,618	91,086
Bener Meriah	125,732	128,070	131,023	134,015	136,385	139,890	143,526	145,086
Pidie Jaya	136,792	139,399	142,887	145,584	148,719	151,472	154,795	158,091
Banda Aceh	229,532	234,517	239,404	249,499	250,303	254,904	259,913	265,111
Sabang	31,314	31,822	32,215	32,739B	33,215	33,622	33,978	34,671
Langsa	153,097	156,505	159,761	162,814	165,890	168,820	171,574	174,318
Lhoksemawe	173,908	179,376	183,232	187,455	191,407	195,186	198,980	203,284
Subussalam	66,110	71,003	72,103	73,708	75,180	77,084	78,725	80,215

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020).

Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk setiap tahunnya mengalami kenaikan. Artinya ada peningkatan pertumbuhan penduduk setiap tahun di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Jumlah penduduk tertinggi berada pada Kabupaten Aceh Utara yaitu sebesar 6.11.435 jiwa. Kabupaten Bireun memiliki jumlah penduduk sebesar 461.726 jiwa. Jumlah penduduk terendah ada pada Kota Sabang yaitu sebesar 34.671 jiwa.

4.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan variabel bebas dalam penelitian ini, Indeks Pembangunan Manusia dapat diukur melalui tiga indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, dan angka harapan hidup. Berdasarkan Tabel 4.2 dari 184 sampel diperoleh nilai rata-rata (*mean*) Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar 68,30persen dan Indeks Pembangunan Manusia maksimum sebesar 84,37 persen. Sementara Indeks Pembangunan Manusia minimum sebesar 59,34 persen. Standar deviasi pada Indeks Pembangunan Manusia dalam penelitian ini sebesar 49,93 persen.

Tabel 4.5
Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2011-2018

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Simeulue	61,03	61,25	61,68	62,18	63,16	63,82	64,41	64,74
Aceh Singkil	63,13	64,23	64,27	65,27	66,05	66,96	67,37	68,02
Aceh Selatan	61,52	61,69	62,27	62,35	63,28	64,13	65,03	65,92
Aceh Tenggara	64,27	64,99	65,55	65,9	68,77	67,48	68,09	68,67
Aceh Timur	62,35	62,93	63,27	63,57	64,55	65,42	66,32	66,82
Aceh Tengah	70	70,18	70,51	70,96	71,51	72,04	77,19	72,64
Aceh Barat	66,47	66,66	66,86	67,31	68,41	69,26	70,2	70,47
Aceh Besar	69,94	70,11	70,61	71,06	71,1	71,75	72	72,73
Pidie	66,95	67,3	67,59	67,37	68,68	69,06	63,52	69,93
Bireun	67,03	67,57	68,23	68,71	69,77	70,21	71,11	71,37
Aceh Utara	64,22	64,82	65,36	65,93	66,85	67,19	67,67	68,36
Aceh Barat Daya	61,75	62,15	60,62	63,08	63,77	64,57	65,09	65,67
Gayo Lues	61,91	62,85	63,22	63,34	63,67	64,26	65,01	68,88
Aceh Tamiang	64,89	65,21	65,56	66,09	67,03	67,41	67,99	68,45
Nagan Raya	64,24	64,91	65,23	65,58	66,73	67,32	67,78	68,15
Aceh Jaya	65,17	66,42	66,92	67,3	67,53	67,7	68,07	68,83
Bener Meriah	68,24	69,14	69,74	70	70,62	71,42	71,89	72,14
Pidie Jaya	68,69	68,9	69,26	69,89	70,49	73,13	71,73	72,12
Banda Aceh	80,87	81,3	81,84	82,22	83,25	83,73	83,95	84,37
Sabang	70,15	70,84	71,07	71,5	72,51	73,36	74,1	74,82
Langsa	72,15	72,75	73,4	73,81	74,74	75,41	75,89	76,34
Lhoksemawe	72,35	73,55	74,13	74,44	75,11	75,78	76,34	76,62
Subussalam	59,34	59,76	60,11	60,39	61,32	62,18	62,88	63,48

Sumber: Badan Pusat Statistik (2020).

Pada Tabel 4.5 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dari tahun 2011-2018 mengalami peningkatan yang signifikan. Kabupaten tertinggi dengan tingkat Indeks Pembangunan Manusia yaitu Kota Banda Aceh yaitu sebesar 84,37 persen, kemudian diikuti oleh Kota Lhokseumawe

sebesar 76,62 persen. Indeks Pembangunan Manusia terendah yaitu diduduki oleh kabupaten Subulussalam yaitu sebesar 63,48 persen.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Penentuan Model Estimasi

Penentuan model estimasi dapat dilakukan dengan 3 uji yaitu *uji chow*, *uji hausman* dan *uji lagrange multiplier-test*. Penggunaan uji tersebut dapat membantu memilih model terbaik yang akan digunakan. Berikut pengujian hipotesis pada pengujian masing-masing uji.

Tabel 4.6 Penentuan Model Estimasi

Alat Pengujian	Hipotesis	Ketentuan	Keterangan
<i>Chow Test</i>	H_0 = menggunakan <i>common effect model</i> .	Jika nilai <i>p-value</i> $> \alpha$ maka H_0 diterima.	Model yang digunakan adalah <i>common effect model</i> .
	H_1 = menggunakan <i>fixed effect model</i> .	Jika nilai <i>p-value</i> $< \alpha$ maka H_0 ditolak.	Model yang digunakan adalah <i>fixed effect model</i> .
<i>Hausman Test</i>	H_0 = menggunakan <i>random effect model</i> .	Jika nilai <i>p-value</i> $> \alpha$ maka H_0 diterima.	Model yang digunakan adalah <i>random effect model</i> .
	H_1 = menggunakan <i>fixed effect model</i> .	Jika nilai <i>p-value</i> $< \alpha$ maka H_0 ditolak.	Model yang digunakan adalah <i>fixed effect model</i> .
<i>Lagrange multiplie</i>	H_0 = menggunakan <i>Common effect model</i> atau <i>pooled least square</i> .	Jika nilai <i>p-value</i> $> \alpha$ (H_0 diterima).	Model yang digunakan adalah <i>Common effect model</i> .
	H_1 = menggunakan <i>Random effect model</i> .	Jika nilai <i>p-value</i> $< \alpha$ maka H_0 ditolak.	Model yang digunakan adalah <i>random effect model</i> .

Sumber: Diolah oleh penulis (2020).

Penelitian ini menggunakan jenis data panel dengan menggunakan tiga model regresi yaitu *common effect model* (CEM), *fixed effect model* (FEM) dan *random effect model* (REM) untuk mengetahui jenis model terbaik dalam penentuan model estimasi. Berikut tabel hasil pengujian uji *Chow*, uji *Hausman* dan uji *Lagrange Multiplier*.

Tabel 4.7
Hasil Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier

Model Estimasi	Alat Pengujian	Chi-Square	P-Value	Model yang Digunakan
<i>Common effect model</i> atau <i>fixed effect model</i>	Uji Chow	426.898162	0.0000	<i>Fixed effect model</i>
<i>Fixed effect model</i> atau <i>random effect model</i>	Uji Hausman	0.515748	0.7727	<i>Random effect model</i>
<i>Common effect model</i> atau <i>random effect model</i>	Uji Lagrange Multiplier	504.4780	0.0000	<i>Random effect model</i>

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2020).

Berdasarkan hasil di atas didapat nilai *p-value* sebesar 0,00 < 0,05 hal ini dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak, maka H_1 diterima yang artinya model *fixed effect* lebih baik dari model *common effect*. Pengujian Hausman menunjukkan nilai *p-value* sebesar 0,9978 > 0,05 sehingga H_0 diterima. Hal ini menjelaskan bahwa regresi

dengan model *random effect* lebih baik daripada regresi menggunakan model *fixed effect*. Selanjutnya pengujian Lagrange Multiplier menunjukkan nilai *p-value* sebesar $0,00 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa regresi dengan model *random effect* lebih baik daripada regresi menggunakan model *common effect*. Dari hasil pengujian diatas maka model yang dipilih adalah *random effect model*.

4.3.2 Uji Signifikansi

Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji t (uji parsial) dan uji f (uji simultan). Berikut hasil dari estimasi *random effect model*:

Tabel 4.8
Hasil Estimasi Random Effect Model

Variabel	Koefisien	P-Value	Keterangan
C	5378.367	0.0000	Signifikan
X1	-1.770959	0.9280	Tidak Signifikan
X2	-0.530310	0.0000	Signifikan
Prob>f (statistik)	0.000000		Signifikan
R-squared	0.297934		
Jumlah Observasi	184		

Sumber: Diolah oleh penulis (2020).

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan hasil dari pengolahan data dengan menggunakan pendekatan *random effect model* maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

- a. Variabel jumlah penduduk memiliki *probability* $0,9280 < 0,05$ artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah penduduk dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
- b. Variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki *probability* $0,00 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima maka terdapat pengaruh yang signifikan antara Indeks Pembangunan Manusia dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil pengujian Tabel 4.8 menunjukkan nilai *f*-statistik sebesar 0,00 di mana nilai tersebut memiliki nilai *probability* lebih kecil 0,05 sehingga variabel jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia diasumsikan secara simultan berpengaruh terhadap kemiskinan dengan tingkat kepercayaan 95%. Berdasarkan hasil pengujian di atas nilai *R-square* sebesar 0,29. Artinya model ini mampu menjelaskan hubungan antara jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 29 persen, sedangkan sisanya 71 persen dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi linear berganda merupakan suatu model hubungan antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat. Regresi linear berganda digunakan untuk melihat arah hubungan, baik

hubungan positif atau negatif dari masing-masing variabel. Selain itu model ini dapat memprediksi nilai dari variabel terikat jika variabel bebas mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Penelitian ini menggunakan tingkat kemiskinan sebagai variabel terikat sedangkan variabel bebas menggunakan variabel jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia. Berikut persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y_{it} = 5378.367 - 1.77\text{Ln}(\text{JP}_{it}) - 0.53(\text{IPM}_{it}) + e$$

Berdasarkan hasil regresi linear berganda diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah sebesar 5378,367 artinya jika variabel bebas yaitu jumlah penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia dianggap konstan maka nilai kemiskinan yang dilambangkan dengan Y adalah sebesar 5378,367 persen.
2. Nilai koefisien jumlah penduduk sebesar -1,77 hal ini menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, jika variabel lain diasumsikan tetap (*ceteris paribus*) maka setiap kenaikan 1 persen variabel jumlah penduduk, tingkat kemiskinan akan menurunt sebesar 1,77 persen.
3. Nilai koefisien IPM sebesar -0,53 hal ini menunjukkan bahwa variabel IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan, jika variabel lain diasumsikan tetap (*ceteris paribus*) maka setiap kenaikan 1 persen variabel IPM, maka

tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0,53 persen.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Berikut hasil penelitian terkait pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

Tabel 4.9
Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-1.770959	19.57373	-0.090476	0.9280

Sumber: data diolah tahun (2020).

Berdasarkan hasil dari analisis regresi pada penelitian ini menemukan bahwa jumlah penduduk memiliki nilai signifikansi $0,9280 > 0,05$ sehingga H_0 diterima yang berarti bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan atau penurunan jumlah penduduk tidak terlalu mempengaruhi tingkat kemiskinan. Agustina, dkk (2010) jumlah penduduk berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

Hasil *coefficient* variabel jumlah penduduk adalah sebesar -1,770959 dengan nilai signifikan sebesar $0,9280 < 0,05$ yang berarti bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak

signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Artinya apabila jumlah penduduk meningkat 1 persen maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1,77 persen. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Silastri (2017) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi. Penambahan jumlah penduduk merupakan sebagai pemicu dalam menggerakkan pembangunan dan kegiatan ekonomi sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Mustika (2011) para ahli ekonomi klasik menjelaskan bahwa jumlah penduduk merupakan input serta investasi yang paling potensial yang dapat digunakan dalam faktor produksi untuk meningkatkan produksi suatu perusahaan. Semakin meningkatnya jumlah penduduk maka akan semakin banyak pula tenaga kerja yang dapat digunakan. Namun hal ini berbanding terbalik dengan teori yang dikemukakan oleh Malthus, bahwa peningkatan jumlah penduduk pada kondisi awal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada saat keadaan optimum pertumbuhan penduduk tidak dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi sebaliknya terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi.

Menurut teori Malthus mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat pada negara berkembang akan mengakibatkan peningkatan tingkat kemiskinan. Malthus menggambarkan secara umum kecenderungan jumlah populasi

akan meningkat sangat cepat berdasarkan deret ukur sedangkan penambahan hasil yang semakin berkurang dari faktor produksi yaitu tanah, maka persediaan pangan akan menurun menurut deret hitung. Hal ini dikarenakan pengadaan peningkatan pangan tidak sebanding dengan kecepatan pertumbuhan penduduk (Todaro dan Smith, 2006). Dampak jangka panjang manusia akan mengalami kekurangan pangan, sehingga mengakibatkan masalah ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan menurun serta kemiskinan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Fadlillah, dkk (2016) menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Artinya apabila jumlah penduduk meningkat satu satuan maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

4.4.2 Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Hasil menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Berikut tabel pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat kemiskinan.

Tabel 4.10
Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X2	-0.530310	0.061599	-8.609113	0.0000

Sumber :data diolah (2020).

Pada Tabel 4.10 dapat di lihat bahwa variabel IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Hasil koefisien variabel IPM sebesar -0,5303 dengan signifikansi $0,00 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa apabila IPM meningkat maka akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Meriyanti (2015) IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kecamatan Buleleng.

Hasil penelitian Lestari (2017) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di provinsi lampung. Artinya bentuk hubungan antara IPM terhadap kemiskinan berbanding terbalik yang berarti bahwa peningkatan IPM satu persen akan menurunkan kemiskinan. Namun sebaliknya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IPM berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan. Artinya naik atau turunnya tingkat kemiskinan tidak dipengaruhi oleh IPM.

Indeks Pembangunan Manusia terdiri dari tiga indikator yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) Angka Melek Huruf (AMH), Paritas Daya Beli. AHH merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemajuan kesehatan suatu wilayah. IPM yang kedua adalah Angka Melek Huruf (AMH), merupakan indikator pendidikan suatu daerah, yang ketiga adalah Paritas Daya Beli antar wilayah. Paritas Daya Beli merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk melakukan perbandingan harga-harga riil antar wilayah. Penurunan kemiskinan saat IPM meningkat

merupakan indikasi bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia akan berakibat pada meningkatnya produktifitas kerja penduduk yang akan meningkatkan pendapatan. Dengan pendapatan yang meningkat akan menyebabkan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya serta dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Hasil regresi juga ditunjang dengan adanya kecenderungan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dari tahun ke tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa meningkatnya IPM telah mampu menurunkan jumlah penduduk miskin di Indonesia (Cholili dan Pudjihardjo, 2014).

Todaro (2003) mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia memainkan tujuan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara serta menyerap kemampuan sebuah negara dan menyerap teknologi modern untuk membangun kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan. Indikator pembangunan manusia merupakan salah satu tolak ukur untuk menilai kualitas pembangunan manusia baik dari segi dampak terhadap kondisi fisik (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non fisik (pengetahuan). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik tercermin pada angka harapan hidup, pendidikan serta kualitas harapan hidup (Susanti, 2013).

4.4.3 Pengaruh Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan indeks pembangunan manusia secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi F sebesar 0,00 lebih kecil dari nilai α 0,05.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alhudori (2017) menyatakan bahwa IPM, PDRB, dan jumlah pengangguran secara simultan berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil penelitian Saraswati, dkk (2017) menyatakan bahwa IPM, jumlah penduduk dan jumlah pengangguran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu.

Menurut realita yang terjadi di Aceh bahwasanya yang paling dominan terjadinya kemiskinan disebabkan oleh total jumlah penduduk yang masih sangat sedikit dibandingkan dengan daerah lain disumatera. Disamping itu, optimalisasi dari sumber daya alamnya masih rendah. Seperti kopi, yang sangat digemari oleh masyarakat dunia, juga produk-produk masyarakat miskin rentan masih belum diolah sehingga tidak mempunyai daya jual yang lebih tinggi.

Menurut direktur penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial kementerian perencanaan poembangunan

nasional (BAPPENAS) mailiki mengatakan kebayakkan juga masyarakat penduduk aceh lebih meperhatikan investasi daripada pengeluaran untuk makanan sehari-hari. Hal inilah yang mempengaruhi profil pengeluaran, dimana kemiskinan sendiri sangatlah dipengaruhi oleh palo makan dan kalori



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka hasil dari penelitian ini menemukan bahwa:

1. Jumlah penduduk berpengaruh negatif dengan nilai probability $0,9280 > 0,05$ artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah penduduk dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
2. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negatif dengan nilai probability $0,00 < 0,05$ artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima maka terdapat pengaruh yang signifikan antara Indeks Pembangunan Manusia dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.
3. Jumlah penduduk dan IPM secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kemiskinan dengan nilai f-statistik sebesar 0,00 di mana nilai tersebut memiliki nilai probability lebih kecil 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%. Dengan nilai *R-square* sebesar 0,29 artinya model ini mampu menjelaskan antara jumlah penduduk dan IPM 29%, sedangkan sisanya 71 persen dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Adapun hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, maka untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Aceh, maka saran penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah diharapkan lebih memperhatikan lagi sektor indeks pembangunan manusia (IPM) supaya dapat menekan dan mengurangi angka kemiskinan dan hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat memberi solusi dan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam hal menanggulangi tingkat kemiskinan di Aceh.
2. Bagi para peneliti selanjutnya dapat menjadi penambah variabel penelitian yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan seperti pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan variabel lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif. (2019), 30 Juli Selasa). *Data BPS: Angka Kemiskinan Di Aceh Terbesar Di Sumatera*. Banda Aceh: Merdeka.com
<https://m.merdeka.com/peristiwa/data-bps-angka-kemiskinan-di-aceh-terbesar-di-sumatera.html>.
- Agustina, Eka. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. Volume 4 Nomor 2.
- Anggraeni, Sinta. (2016). *Analisis Determinan Kemiskinan Di Provinsi Lampung*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung.
- Ansofino, Jolianis, Yolamalinda, Arfilindo, Hagi. (2016). *Buku Ajar Ekonometrika*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Atmaja, Lukas Setia. (2009). *Statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Badan pusat statistic (2015). *Indeks pembangunan manusia*. Sulawesi selatan
- BPS. 2013. *Aceh Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2017. *Aceh Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik.
- _____ 2019. *Aceh Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik.
- _____ 2021. *Aceh Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik.

- David, K. Zuhdiyati, Noor. (2017). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Jibeka. Volume 11 No 2 Februari: 27-31.*
- Didu, Saharuddin, and Ferri Fauzi. "Pengaruh jumlah penduduk, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak." *Jurnal Ekonomi-Qu 6.1. 2016. di-indonesia.*
- Djohan, Teuku Irwan. (2017, 14 Agustus, Senin). Irwan Djohan: Ledakan Penduduk Miskin Aceh Terjadi Pada 2001-2002. Aceh Joenal National Network Redaksi. <https://www.ajnn.net/news/irwan-djohan-ledakan-penduduk-miskin-di-aceh-terjadi-pada-> *Domestik* Jurnal Ekonomi Regional Unimal 1. 2018:
- Dwihapsari, Ratna, Yulianita.(2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan. Volume 19 No 1. Ekonomi dan Bisnis. Volume 1 No1.*
- Ferianto, N.(2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jln. Palagan Tentara Pelajar Km. 7 Yogyakarta : UPP STIM YKPM.
- Ghazali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 edisi 8*. Semarang:UNDIP. <https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d/4117707/ini-definisi-orang-miskin-di-indonesia> Jakarta: PT Media Global Edukasi. Jawa Timur. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh. *Jurnal Serambi*

Kolibu, Meiny. (2019). Pengaruh Tingkat Inflasi, Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 4 No 2, 165-173*.

Kuncoro, Mudrajad. (2010). *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: Erlangga.

Kuncoro, Mudrajad, 2003. Otomidan Pembangunan Daerah,

Kusuma, Hendra. (2018, 16 juli Senin 17:56). *Ini Definisi Orang*

Kusuma, Hendra. (2018, 16 juli Senin 17:56). *Ini Definisi Orang Miskin Di Indonesia*. Jakarta: Detik Finance.

Mahsunah, Durrotul. 2012. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. Tersedia di <http://ejournal.unesa.ac.id> [diakses pada tanggal 3 Mei 2016].

Maipita, I. (2014). *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN. *Media Metode Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta. *Miskin Di Indonesia*. Jakarta: Detik Finance. *Multidimensional*. Semarang: UNDIP PRESS

Nasir. (2014). Pengaruh PDRB, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh. *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis. Volume 1 No1*

Nugroho, Priyo Adi. (2015). *Pengaruh PDRB, Tingkat Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota Yogyakarta Tahun 1999-2013*. Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Pembangunan. Jakarta : Erlangga *Penduduk, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi* Penelitian dan Pengembangan

Ekonomi dan Sosial. Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Penerbit Erlangga, Jakarta.

- Priyatno, Duwi. (2012). *Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS*. Yogyakarta: Media Kom.
- Purnama, Ika Nadia. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume 17 No 1.
- Putra, Dhimas Anggara Willy. 2015. *Determinan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Periode 2009-2013*. Jember : Universitas Jember. Rajawali Pers. sukarno, Zulfikry. Rapanna, Dr. Patta. *Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi*. Diss. Riau University, 2017.
- Retnowati, Diah. Harsuti. (2014). Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskinan DI Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi*. Volume 6,j No 1.
- Said, Rusli. 2001. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta: **Lembaga** Semarang: UNDIP.
- Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi pembangunan*. Jakarta: Erlangga
- Silalahi, Remus, dkk. 2014. *Pengantar Ekonomi Makro*. Bandung. CitaPustaka.
- Silastri, Novri, Rita Yani Iyan, and Lapeti Sari. *Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kuantan Singingi*. Diss. Riau University, 2017.
- Starz, Richard. Stanley, Rudiger. (2001). *Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Media Global Edukasi.

- Sugiyono.(2018). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukarno, Zulfikry. Rapanna, Dr. Patta. (2017). *Ekonomi Pembangunan*. Makassar: CV Sah Media
- Sukirno, Sadono. (2012). *Makro Ekonomi Teori Penganta*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryawati, Chriswardani. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional*. Semarang: UNDIP PRESS..
- Taringan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional 'Teoridan Aplikasi'' Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau.*
Tersedia di <http://ejournal.unesa.ac.id> [diakses pada tanggal
- Usman, Umarrudin, and D. Mita. "Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau." *Jurnal Ekonomi Regional Unimal* 1. 2018: 2.
- Waruwu, Adil, Serri Jefry. (2016). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, Dan Investasi Terhadap Tingkat Kemiskinan DI Indonesia Tahun 1995-2014*. Skripsi Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Widiastuti, Angga Tri. (2016). *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten Jawa Tengah*. Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah Suraka

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Data Analisis Regresi Panel

Kab/Kota	Tahun	Kemiskinan	Jumlah Penduduk	IPM
Kab. Simeulue	2011	22,96	83.006	61,03
Kab. Simeulue	2012	21,88	84.722	61,25
Kab. Simeulue	2013	20,57	86.206	61,68
Kab. Simeulue	2014	19,92	87.598	62,18
Kab. Simeulue	2015	20,43	89.117	63,16
Kab. Simeulue	2016	19,93	90.291	63,82
Kab. Simeulue	2017	20,21	91.372	64,41
Kab. Simeulue	2018	19,78	92.393	64,74
Kab. Aceh singkil	2011	18,93	105.174	63,13
Kab. Aceh singkil	2012	17,92	107.697	64,23
Kab. Aceh singkil	2013	18,73	110.108	64,27
Kab. Aceh singkil	2014	17,77	112.161	65,27
Kab. Aceh singkil	2015	21,72	114.518	66,05
Kab. Aceh singkil	2016	21,61	116.712	66,96
Kab. Aceh singkil	2017	20,11	119.490	67,37
Kab. Aceh singkil	2018	21,25	121.681	68,02
kab. Aceh selatan	2011	15,52	207.971	61,52
kab. Aceh selatan	2012	14,81	212.612	61,69
kab. Aceh selatan	2013	13,44	216.994	62,27
kab. Aceh selatan	2014	12,79	220.971	62,35
kab. Aceh selatan	2015	13,24	224.897	63,28
kab. Aceh selatan	2016	13,48	228.608	64,13
kab. Aceh selatan	2017	14,07	231.490	65,03
kab. Aceh selatan	2018	14,01	235.115	65,92
kab. Aceh tenggara	2011	16,39	184.173	64,27
kab. Aceh tenggara	2012	15,64	187.276	64,99
kab. Aceh tenggara	2013	14,39	192.013	65,55
kab. Aceh tenggara	2014	13,75	196.249	65,91

kab. Aceh tenggara	2015	14,91	200.014	68,77
kab. Aceh tenggara	2016	14,46	204.468	67,48
kab. Aceh tenggara	2017	14,86	208.481	68,09
kab. Aceh tenggara	2018	14,29	212.417	68,67
kab. Aceh timur	2011	18,01	370.276	62,35
kab. Aceh timur	2012	17,19	378.424	62,93
kab. Aceh timur	2013	16,59	386.212	63,27
kab. Aceh timur	2014	15,88	394.933	63,57
kab. Aceh timur	2015	15,85	402.976	64,55
kab. Aceh timur	2016	15,06	411.279	65,42
kab. Aceh timur	2017	15,25	419.594	66,32
kab. Aceh timur	2018	14,49	427.567	66,82
kab. Aceh tengah	2011	19,58	180.230	70,01
kab. Aceh tengah	2012	18,78	183.792	70,18
kab. Aceh tengah	2013	17,76	188.214	70,51
kab. Aceh tengah	2014	16,99	192.204	70,96
kab. Aceh tengah	2015	17,51	196.090	71,51
kab. Aceh tengah	2016	16,64	200.412	72,04
kab. Aceh tengah	2017	16,84	204.273	77,19
kab. Aceh tengah	2018	15,58	208.505	72,64
kab. Aceh barat	2011	23,81	178.173	66,47
kab. Aceh barat	2012	27,76	181.886	66,66
kab. Aceh barat	2013	23,71	185.903	66,86
kab. Aceh barat	2014	22,97	190.244	67,31
kab. Aceh barat	2015	21,46	193.791	68,41
kab. Aceh barat	2016	20,36	197.921	69,26
kab. Aceh barat	2017	20,28	301.682	70,21
kab. Aceh barat	2018	19,31	205.971	70,47
kab. Aceh besar	2011	18,36	361.290	69,94
kab. Aceh besar	2012	17,61	369.134	70,11
kab. Aceh besar	2013	16,88	376.491	70,61
kab. Aceh besar	2014	16,13	384.618	71,06
kab. Aceh besar	2015	15,93	392.584	71,11

kab. Aceh besar	2016	15,55	400.913	71,75
kab. Aceh besar	2017	15,41	409.109	72,01
kab. Aceh besar	2018	14,47	417.302	72,73
kab. Pidie	2011	23,19	389.529	66,95
kab. Pidie	2012	22,12	397.590	67,31
kab. Pidie	2013	21,12	404.817	67,59
kab. Pidie	2014	20,29	410.580	67,37
kab. Pidie	2015	21,18	418.882	68,68
kab. Pidie	2016	21,25	425.974	69,06
kab. Pidie	2017	21,43	432.599	63,52
kab. Pidie	2018	20,47	439.131	69,93
kab. Bireun	2011	19,06	400.027	67,03
kab. Bireun	2012	18,21	408.608	67,57
kab. Bireun	2013	17,65	417.289	68,23
kab. Bireun	2014	16,94	423.397	68,71
kab. Bireun	2015	16,94	435.300	69,77
kab. Bireun	2016	15,95	443.492	70,21
kab. Bireun	2017	15,87	453.224	71,11
kab. Bireun	2018	14,31	461.726	71,37
kab. Aceh utara	2011	22,89	544.789	64,22
kab. Aceh utara	2012	21,89	555.746	64,82
kab. Aceh utara	2013	20,34	565.370	65,36
kab. Aceh utara	2014	19,58	572.961	65,93
kab. Aceh utara	2015	19,21	585.892	66,85
kab. Aceh utara	2016	19,46	593.492	67,19
kab. Aceh utara	2017	18,43	602.554	67,67
kab. Aceh utara	2018	18,27	611.435	68,36
kab. Aceh Barat daya	2011	19,49	129.708	61,75
kab. Aceh Barat daya	2012	18,51	132.612	62,15
kab. Aceh Barat daya	2013	18,92	136.370	60,62
kab. Aceh Barat daya	2014	17,99	138.140	63,08
kab. Aceh Barat daya	2015	18,25	140.689	63,77
kab. Aceh Barat daya	2016	18,03	143.312	64,57

kab. Aceh Barat daya	2017	18,31	145.726	65,09
kab. Aceh Barat daya	2018	17,01	148.111	65,67
kab. Gayo lues	2011	23,38	81.604	61,91
kab. Gayo lues	2012	22,31	83.189	62,85
kab. Gayo lues	2013	22,32	84.717	63,22
kab. Gayo lues	2014	21,43	86.262	63,34
kab. Gayo lues	2015	21,95	87.881	63,67
kab. Gayo lues	2016	21,86	89.500	64,26
kab. Gayo lues	2017	21,97	91.024	65,01
kab. Gayo lues	2018	20,70	92.608	68,88
kab. Aceh tamiang	2011	17,49	258.896	64,89
kab. Aceh tamiang	2012	10,71	264.167	65,21
kab. Aceh tamiang	2013	15,13	269.007	65,56
kab. Aceh tamiang	2014	14,58	272.228	66,09
kab. Aceh tamiang	2015	14,57	278.324	67,03
kab. Aceh tamiang	2016	14,51	282.921	67,41
kab. Aceh tamiang	2017	14,64	287.007	67,99
kab. Aceh tamiang	2018	14,21	291.112	68,45
kab. Nagan raya	2011	23,38	143.718	64,24
kab. Nagan raya	2012	22,27	146.386	64,91
kab. Nagan raya	2013	21,75	149.397	65,23
kab. Nagan raya	2014	20,85	152.352	65,58
kab. Nagan raya	2015	20,13	155.070	66,73
kab. Nagan raya	2016	19,25	158.223	67,32
kab. Nagan raya	2017	19,34	161.329	67,78
kab. Nagan raya	2018	18,97	164.483	68,15
kab. Aceh jaya	2011	19,80	78.984	65,17
kab. Aceh jaya	2012	18,31	80.573	66,42
kab. Aceh jaya	2013	17,53	82.385	66,92
kab. Aceh jaya	2014	16,52	86.123	67,31
kab. Aceh jaya	2015	15,93	86.385	67,53
kab. Aceh jaya	2016	15,01	87.622	67,71
kab. Aceh jaya	2017	14,85	89.618	68,07

kab. Aceh jaya	2018	14,16	91.086	68,83
kab. Bener meriah	2011	25,50	125.732	68,24
kab. Bener meriah	2012	24,51	128.070	69,14
kab. Bener meriah	2013	23,47	131.023	69,74
kab. Bener meriah	2014	22,45	134.015	70,01
kab. Bener meriah	2015	21,55	136.385	70,62
kab. Bener meriah	2016	21,43	139.890	71,42
kab. Bener meriah	2017	21,14	143.526	71,89
kab. Bener meriah	2018	20,23	145.086	72,14
kab. Pidie jaya	2011	25,43	136.792	68,69
kab. Pidie jaya	2012	24,35	139.399	68,91
kab. Pidie jaya	2013	22,71	142.887	69,26
kab. Pidie jaya	2014	21,78	145.584	69,89
kab. Pidie jaya	2015	21,41	148.719	70,49
kab. Pidie jaya	2016	21,18	151.472	73,13
kab. Pidie jaya	2017	21,82	154.795	71,73
kab. Pidie jaya	2018	20,17	158.091	72,12
kota. Banda aceh	2011	9.08	229.532	80,87
kota. Banda aceh	2012	8.65	234.517	81,31
kota. Banda aceh	2013	8.03	239.404	81,84
kota. Banda aceh	2014	7.78	249.499	82,22
kota. Banda aceh	2015	7.72	250.303	83,25
kota. Banda aceh	2016	7.41	254.904	83,73
kota. Banda aceh	2017	7.44	259.913	83,95
kota. Banda aceh	2018	7.25	265.111	84,37
kota sabang	2011	21,31	31.314	70,15
kota sabang	2012	20,51	31.822	70,84
kota sabang	2013	18,31	32.215	71,07
kota sabang	2014	17,02	32.739	71,51
kota sabang	2015	17,69	33.215	72,51
kota sabang	2016	17,33	33.622	73,36
kota sabang	2017	17,66	33.978	74,11
kota sabang	2018	16,31	34.671	74,82

kota langsa	2011	14,66	153.097	72,15
kota langsa	2012	13,93	156.505	72,75
kota langsa	2013	12,62	159.761	73,41
kota langsa	2014	12,08	162.814	73,81
kota langsa	2015	11,62	165.890	74,74
kota langsa	2016	11,09	168.820	75,41
kota langsa	2017	11,24	171.574	75,89
kota langsa	2018	10,79	174.318	76,34
kota lhokseumawe	2011	13,73	173.908	72,35
kota lhokseumawe	2012	13,06	179.376	73,55
kota lhokseumawe	2013	12,47	183.232	74,13
kota lhokseumawe	2014	11,93	187.455	74,44
kota lhokseumawe	2015	12,16	191.407	75,11
kota lhokseumawe	2016	11,98	195.186	75,78
kota lhokseumawe	2017	12,32	198.980	76,34
kota lhokseumawe	2018	11,81	203.284	76,62
kota subulussalam	2011	23,85	66.110	59,34
kota subulussalam	2012	12,64	71.003	59,76
kota subulussalam	2013	20,69	72.103	60,11
kota subulussalam	2014	19,72	73.708	60,39
kota subulussalam	2015	20,39	75.180	61,32
kota subulussalam	2016	19,51	77.084	62,18
kota subulussalam	2017	19,71	78.725	62,88
kota subulussalam	2018	18,51	80.215	63,48

Lampiran 2.**Data Logaritma Analisis Regresi Panel**

Kab/Kota	Tahun	Kemiskinan	Ln JP	IPM
Kab. Simeulue	2011	22,96	11	61,03
Kab. Simeulue	2012	21,88	11	61,25
Kab. Simeulue	2013	20,57	11	61,68
Kab. Simeulue	2014	19,92	11	62,18
Kab. Simeulue	2015	20,43	11	63,16
Kab. Simeulue	2016	19,93	11	63,82
Kab. Simeulue	2017	20,21	11	64,41
Kab. Simeulue	2018	19,78	11	64,74
Kab. Aceh singkil	2011	18,93	12	63,13
Kab. Aceh singkil	2012	17,92	12	64,23
Kab. Aceh singkil	2013	18,73	12	64,27
Kab. Aceh singkil	2014	17,77	12	65,27
Kab. Aceh singkil	2015	21,72	12	66,05
Kab. Aceh singkil	2016	21,61	12	66,96
Kab. Aceh singkil	2017	20,11	12	67,37
Kab. Aceh singkil	2018	21,25	12	68,02
kab. Aceh selatan	2011	15,52	12	61,52
kab. Aceh selatan	2012	14,81	12	61,69
kab. Aceh selatan	2013	13,44	12	62,27
kab. Aceh selatan	2014	12,79	12	62,35
kab. Aceh selatan	2015	13,24	12	63,28
kab. Aceh selatan	2016	13,48	12	64,13
kab. Aceh selatan	2017	14,07	12	65,03
kab. Aceh selatan	2018	14,01	12	65,92
kab. Aceh tenggara	2011	16,39	5	64,27
kab. Aceh tenggara	2012	15,64	12	64,99
kab. Aceh tenggara	2013	14,39	12	65,55
kab. Aceh tenggara	2014	13,75	12	65,91
kab. Aceh tenggara	2015	14,91	12	68,77

kab. Aceh tenggara	2016	14,46	12	67,48
kab. Aceh tenggara	2017	14,86	12	68,09
kab. Aceh tenggara	2018	14,29	12	68,67
kab. Aceh timur	2011	18,01	13	62,35
kab. Aceh timur	2012	17,19	13	62,93
kab. Aceh timur	2013	16,59	13	63,27
kab. Aceh timur	2014	15,88	13	63,57
kab. Aceh timur	2015	15,85	13	64,55
kab. Aceh timur	2016	15,06	13	65,42
kab. Aceh timur	2017	15,25	13	66,32
kab. Aceh timur	2018	14,49	13	66,82
kab. Aceh tengah	2011	19,58	12	70,01
kab. Aceh tengah	2012	18,78	12	70,18
kab. Aceh tengah	2013	17,76	12	70,51
kab. Aceh tengah	2014	16,99	12	70,96
kab. Aceh tengah	2015	17,51	12	71,51
kab. Aceh tengah	2016	16,64	12	72,04
kab. Aceh tengah	2017	16,84	12	77,19
kab. Aceh tengah	2018	15,58	12	72,64
kab. Aceh barat	2011	23,81	12	66,47
kab. Aceh barat	2012	27,76	12	66,66
kab. Aceh barat	2013	23,71	12	66,86
kab. Aceh barat	2014	22,97	12	67,31
kab. Aceh barat	2015	21,46	12	68,41
kab. Aceh barat	2016	20,36	12	69,26
kab. Aceh barat	2017	20,28	13	70,21
kab. Aceh barat	2018	19,31	12	70,47
kab. Aceh besar	2011	18,36	13	69,94
kab. Aceh besar	2012	17,61	13	70,11
kab. Aceh besar	2013	16,88	13	70,61
kab. Aceh besar	2014	16,13	13	71,06
kab. Aceh besar	2015	15,93	13	71,11
kab. Aceh besar	2016	15,55	13	71,75

kab. Aceh besar	2017	15,41	13	72,01
kab. Aceh besar	2018	14,47	13	72,73
kab. Pidie	2011	23,19	13	66,95
kab. Pidie	2012	22,12	13	67,31
kab. Pidie	2013	21,12	13	67,59
kab. Pidie	2014	20,29	13	67,37
kab. Pidie	2015	21,18	13	68,68
kab. Pidie	2016	21,25	13	69,06
kab. Pidie	2017	21,43	13	63,52
kab. Pidie	2018	20,47	13	69,93
kab. Bireun	2011	19,06	13	67,03
kab. Bireun	2012	18,21	13	67,57
kab. Bireun	2013	17,65	13	68,23
kab. Bireun	2014	16,94	13	68,71
kab. Bireun	2015	16,94	13	69,77
kab. Bireun	2016	15,95	13	70,21
kab. Bireun	2017	15,87	13	71,11
kab. Bireun	2018	14,31	13	71,37
kab. Aceh utara	2011	22,89	13	64,22
kab. Aceh utara	2012	21,89	13	64,82
kab. Aceh utara	2013	20,34	13	65,36
kab. Aceh utara	2014	19,58	13	65,93
kab. Aceh utara	2015	19,21	13	66,85
kab. Aceh utara	2016	19,46	13	67,19
kab. Aceh utara	2017	18,43	13	67,67
kab. Aceh utara	2018	18,27	13	68,36
kab. Aceh Barat daya	2011	19,49	12	61,75
kab. Aceh Barat daya	2012	18,51	12	62,15
kab. Aceh Barat daya	2013	18,92	12	60,62
kab. Aceh Barat daya	2014	17,99	12	63,08
kab. Aceh Barat daya	2015	18,25	12	63,77
kab. Aceh Barat daya	2016	18,03	12	64,57
kab. Aceh Barat daya	2017	18,31	12	65,09

kab. Aceh Barat daya	2018	17,01	12	65,67
kab. Gayo lues	2011	23,38	11	61,91
kab. Gayo lues	2012	22,31	11	62,85
kab. Gayo lues	2013	22,32	11	63,22
kab. Gayo lues	2014	21,43	11	63,34
kab. Gayo lues	2015	21,95	11	63,67
kab. Gayo lues	2016	21,86	11	64,26
kab. Gayo lues	2017	21,97	11	65,01
kab. Gayo lues	2018	20,70	11	68,88
kab. Aceh tamiang	2011	17,49	12	64,89
kab. Aceh tamiang	2012	10,71	12	65,21
kab. Aceh tamiang	2013	15,13	13	65,56
kab. Aceh tamiang	2014	14,58	13	66,09
kab. Aceh tamiang	2015	14,57	13	67,03
kab. Aceh tamiang	2016	14,51	13	67,41
kab. Aceh tamiang	2017	14,64	13	67,99
kab. Aceh tamiang	2018	14,21	13	68,45
kab. Nagan raya	2011	23,38	12	64,24
kab. Nagan raya	2012	22,27	12	64,91
kab. Nagan raya	2013	21,75	12	65,23
kab. Nagan raya	2014	20,85	12	65,58
kab. Nagan raya	2015	20,13	12	66,73
kab. Nagan raya	2016	19,25	12	67,32
kab. Nagan raya	2017	19,34	12	67,78
kab. Nagan raya	2018	18,97	12	68,15
kab. Aceh jaya	2011	19,80	11	65,17
kab. Aceh jaya	2012	18,31	11	66,42
kab. Aceh jaya	2013	17,53	11	66,92
kab. Aceh jaya	2014	16,52	11	67,31
kab. Aceh jaya	2015	15,93	11	67,53
kab. Aceh jaya	2016	15,01	11	67,71
kab. Aceh jaya	2017	14,85	11	68,07
kab. Aceh jaya	2018	14,16	11	68,83

kab. Bener meriah	2011	25,50	12	68,24
kab. Bener meriah	2012	24,51	12	69,14
kab. Bener meriah	2013	23,47	12	69,74
kab. Bener meriah	2014	22,45	12	70,01
kab. Bener meriah	2015	21,55	12	70,62
kab. Bener meriah	2016	21,43	12	71,42
kab. Bener meriah	2017	21,14	12	71,89
kab. Bener meriah	2018	20,23	12	72,14
kab. Pidie jaya	2011	25,43	12	68,69
kab. Pidie jaya	2012	24,35	12	68,91
kab. Pidie jaya	2013	22,71	12	69,26
kab. Pidie jaya	2014	21,78	12	69,89
kab. Pidie jaya	2015	21,41	12	70,49
kab. Pidie jaya	2016	21,18	12	73,13
kab. Pidie jaya	2017	21,82	12	71,73
kab. Pidie jaya	2018	20,17	12	72,12
kota. Banda aceh	2011	9,08	12	80,87
kota. Banda aceh	2012	8,65	12	81,31
kota. Banda aceh	2013	8,03	12	81,84
kota. Banda aceh	2014	7,78	12	82,22
kota. Banda aceh	2015	7,72	12	83,25
kota. Banda aceh	2016	7,41	12	83,73
kota. Banda aceh	2017	7,44	12	83,95
kota. Banda aceh	2018	7,25	12	84,37
kota sabang	2011	21,31	10	70,15
kota sabang	2012	20,51	10	70,84
kota sabang	2013	18,31	10	71,07
kota sabang	2014	17,02	10	71,51
kota sabang	2015	17,69	10	72,51
kota sabang	2016	17,33	10	73,36
kota sabang	2017	17,66	10	74,11
kota sabang	2018	16,31	10	74,82
kota langsa	2011	14,66	12	72,15

kota langsa	2012	13,93	12	72,75
kota langsa	2013	12,62	12	73,41
kota langsa	2014	12,08	12	73,81
kota langsa	2015	11,62	12	74,74
kota langsa	2016	11,09	12	75,41
kota langsa	2017	11,24	12	75,89
kota langsa	2018	10,79	12	76,34
kota lhokseumawe	2011	13,73	12	72,35
kota lhokseumawe	2012	13,06	12	73,55
kota lhokseumawe	2013	12,47	12	74,13
kota lhokseumawe	2014	11,93	12	74,44
kota lhokseumawe	2015	12,16	12	75,11
kota lhokseumawe	2016	11,98	12	75,78
kota lhokseumawe	2017	12,32	12	76,34
kota lhokseumawe	2018	11,81	12	76,62
kota subulussalam	2011	23,85	11	59,34
kota subulussalam	2012	12,64	11	59,76
kota subulussalam	2013	20,69	11	60,11
kota subulussalam	2014	19,72	11	60,39
kota subulussalam	2015	20,39	11	61,32
kota subulussalam	2016	19,51	11	62,18
kota subulussalam	2017	19,71	11	62,88
kota subulussalam	2018	18,51	11	63,48

Lampiran 3.

PERSENTASE KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH TAHUN 2011-2018

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Simeulue	22,96	21,88	20,57	19,92	20,43	19,93	20,20	19,78
Aceh Singkil	18,93	17,92	18,73	17,77	21,72	21,6	22,11	21,25
Aceh Selatan	15,52	14,81	13,44	12,79	13,24	13,48	14,07	14,01
Aceh Tenggara	16,39	15,64	14,39	13,75	14,91	14,46	14,86	14,29
Aceh Timur	18,01	17,19	16,59	15,88	15,85	15,06	15,25	14,49
Aceh Tengah	19,58	18,78	17,76	16,99	17,51	16,64	16,84	15,58
Aceh Barat	23,81	27,76	23,7	22,97	21,46	20,36	20,28	19,31
Aceh Besar	18,36	17,6	16,88	16,13	15,93	15,55	15,41	14,47
Pidie	23,19	22,12	21,12	20,29	21,18	21,25	21,43	20,47
Bireun	19,06	18,21	17,65	16,94	16,94	15,95	15,87	14,31
Aceh Utara	22,89	21,89	20,34	19,58	19,2	19,46	18,43	18,27
Aceh Barat Daya	19,49	18,51	18,92	17,99	18,25	18,03	18,31	17,10
Gayo Lues	23,38	22,31	22,32	21,43	21,95	21,86	21,97	20,70
Aceh Tamiang	17,49	10,7	15,13	14,58	14,57	14,51	14,64	14,21
Nagan Raya	23,38	22,27	21,75	20,85	20,13	19,25	19,34	18,97
Aceh Jaya	19,80	18,3	17,53	16,52	15,93	15,01	14,85	14,16
Bener Meriah	25,50	24,5	23,47	22,45	21,55	21,43	21,14	20,23
Pidie Jaya	25,43	24,35	22,7	21,78	21,4	21,18	21,82	20,17
Banda Aceh	9,08	8,65	8,03	7,78	7,72	7,41	7,44	7,25
Sabang	21,31	20,51	18,31	17,02	17,69	17,33	17,66	16,31
Langsa	14,66	13,93	12,62	12,08	11,62	11,09	11,24	10,79
Lhoksemae	13,73	13,06	12,47	11,93	12,16	11,98	12,32	11,81
Subussalam	23,85	12,64	20,69	19,72	20,39	19,51	19,71	18,51

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Lampiran 4.

JUMLAH PENDUDUK DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI ACEH TAHUN 2011-2018

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	3014	2015	2016	2017	2018
Simeulue	83.006	84.722	86.206	87.598	89.117	90.291	91.372	92.393
Aceh Singkil	105.174	107.697	110.108	112.161	114.518	116.712	119.490	121.681
Aceh Selatan	207.971	212.612	216.994	220.971	224.897	228.608	231.490	235.115
Aceh Tenggara	184.173	187.276	192.013	196.249	200.014	204.468	208.481	212.417
Aceg Timur	370.276	378.424	386.212	394.933	402.976	411.279	419.594	427.567
Aceh Tengah	180.230	183.792	188.214	192.204	196.090	200.412	204.273	208.505
Aceh Barat	178.173	181.886	185.903	190.244	193.791	197.921	301.682	205.971
Aceh Besar	361.290	369.134	376.491	384.618	392.584	400.913	409.109	417.302
Pidie	389.529	397.590	404.817	410.580	418.882	425.974	432.599	439.131
Bireuen	400.027	408.608	417.289	423.397	435.300	443.492	453.224	461.726
Aceh Utara	544.789	555.746	565.370	572.961	585.892	593.492	602.554	611.435
Aceh Barat Daya	129.708	132.612	136.370	138.140	140.689	143.312	145.726	148.111
Gayo Lues	81.604	83.189	84.717	86.262	87.881	89.500	91.024	92.608
Aceh Tamiang	258.896	264.167	269.007	272.228	278.324	282.921	287.007	291.112
Nagan Raya	143.718	146.386	149.397	152.352	155.070	158.223	161.329	164.483
Aceh Jaya	78.984	80.573	82.385	86.123	86.385	87.622	89.618	91.086
Bener Meriah	125.732	128.070	131.023	134.015	136.385	139.890	143.526	145.086
Pidie Jaya	136.792	139.399	142.887	145.584	148.719	151.472	154.795	158.091
Banda Aceh	229.532	234.517	239.404	249.499	250.303	254.904	259.913	265.111
Sabang	31.314	31.822	32.215	32.739	33.215	33.622	33.978	34.671
Langsa	153.097	156.505	159.761	162.814	165.890	168.820	171.574	174.318
Lhoksemawe	173.908	179.376	183.232	187.455	191.407	195.186	198.980	203.284
Subussalam	66.110	71.003	72.103	73.708	75.180	77.084	78.725	80.215

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Lampiran 5.

Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2011-2018

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Simeulue	61,03	61,25	61,68	62,18	63,16	63,82	64,41	64,74
Aceh Singkil	63,13	64,23	64,27	65,27	66,05	66,96	67,37	68,02
Aceh Selatan	61,52	61,69	62,27	62,35	63,28	64,13	65,03	65,92
Aceh Tenggara	64,27	64,99	65,55	65,9	68,77	67,48	68,09	68,67
Aceh Timur	62,35	62,93	63,27	63,57	64,55	65,42	66,32	66,82
Aceh Tengah	70	70,18	70,51	70,96	71,51	72,04	77,19	72,64
Aceh Barat	66,47	66,66	66,86	67,31	68,41	69,26	70,2	70,47
Aceh Besar	69,94	70,11	70,61	71,06	71,1	71,75	72	72,73
Pidie	66,95	67,3	67,59	67,37	68,68	69,06	63,52	69,93
Bireun	67,03	67,57	68,23	68,71	69,77	70,21	71,11	71,37
Aceh Utara	64,22	64,82	65,36	65,93	66,85	67,19	67,67	68,36
Aceh Barat Daya	61,75	62,15	60,62	63,08	63,77	64,57	65,09	65,67
Gayo Lues	61,91	62,85	63,22	63,34	63,67	64,26	65,01	68,88
Aceh Tamiang	64,89	65,21	65,56	66,09	67,03	67,41	67,99	68,45
Nagan Raya	64,24	64,91	65,23	65,58	66,73	67,32	67,78	68,15
Aceh Jaya	65,17	66,42	66,92	67,3	67,53	67,7	68,07	68,83
Bener Meriah	68,24	69,14	69,74	70	70,62	71,42	71,89	72,14
Pidie Jaya	68,69	68,9	69,26	69,89	70,49	73,13	71,73	72,12
Banda Aceh	80,87	81,3	81,84	82,22	83,25	83,73	83,95	84,37
Sabang	70,15	70,84	71,07	71,5	72,51	73,36	74,1	74,82
Langsa	72,15	72,75	73,4	73,81	74,74	75,41	75,89	76,34
Lhoksemawe	72,35	73,55	74,13	74,44	75,11	75,78	76,34	76,62
Subussalam	59,34	59,76	60,11	60,39	61,32	62,18	62,88	63,48

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Lampiran 6.

COMMON EFFECT MODELS

Dependent Variable: Y
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/18/20 Time: 10:20
 Sample: 2011 2018
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 184

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6169.269	525.0537	11.74979	0.0000
X1	-8.902538	31.44926	-0.283076	0.7774
X2	-0.633621	0.058823	-10.77163	0.0000
R-squared	0.394005	Mean dependent var		1735.08
Adjusted R-squared	0.387309	S.D. dependent var		3
S.E. of regression	395.6646	Akaike info criterion		505.483
Sum squared resid	28335635	Schwarz criterion		0
Log likelihood	-1359.997	Hannan-Quinn criter.		14.8151
F-statistic	58.84125	Durbin-Watson stat		8
Prob(F-statistic)	0.000000			14.8676
				14.8364
				3
				0.17499
				8

Lampiran 7.

FIXED EFFECT MODELS

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 06/18/20 Time: 10:20
Sample: 2011 2018
Periods included: 8
Cross-sections included: 23
Total panel (balanced) observations: 184

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5270.673	473.3328	11.13524	0.0000
X1	-1.957740	19.93481	-0.098207	0.9219
X2	-0.514216	0.065766	-7.818922	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.940453	Mean dependent var	1735.083
Adjusted R-squared	0.931464	S.D. dependent var	505.4830
S.E. of regression	132.3320	Akaike info criterion	12.73421
Sum squared resid	2784370.	Schwarz criterion	13.17102
Log likelihood	-1146.548	Hannan-Quinn criter.	12.91126
F-statistic	104.6309	Durbin-Watson stat	1.695227
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 8.

UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	66.322360	(22,159)	0.0000
Cross-section Chi-square	426.898162	22	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 06/18/20 Time: 10:22

Sample: 2011 2018

Periods included: 8

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 184

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6169.269	525.0537	11.74979	0.0000
X1	-8.902538	31.44926	-0.283076	0.7774
X2	-0.633621	0.058823	-10.77163	0.0000
R-squared	0.394005	Mean dependent var		1735.083
Adjusted R-squared	0.387309	S.D. dependent var		505.4830
S.E. of regression	395.6646	Akaike info criterion		14.81518
Sum squared resid	28335635	Schwarz criterion		14.86760
Log likelihood	-1359.997	Hannan-Quinn criter.		14.83643
F-statistic	58.84125	Durbin-Watson stat		0.174998
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 9.

RANDOM EFFECT MODELS

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/18/20 Time: 10:22
 Sample: 2011 2018
 Periods included: 8
 Cross-sections included: 23
 Total panel (balanced) observations: 184
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5378.367	456.4098	11.78407	0.0000
X1	-1.770959	19.57373	-0.090476	0.9280
X2	-0.530310	0.061599	-8.609113	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			396.2898	0.8997
Idiosyncratic random			132.3320	0.1003
Weighted Statistics				
R-squared	0.297934	Mean dependent var	203.4331	
Adjusted R-squared	0.290177	S.D. dependent var	156.4234	
S.E. of regression	131.7883	Sum squared resid	3143636.	
F-statistic	38.40529	Durbin-Watson stat	1.509888	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.383166	Mean dependent var	1735.083	
Sum squared resid	28842477	Durbin-Watson stat	0.164568	

Lampiran 10.

UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.515748	2	0.7727

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	-1.957740	-1.770959	14.265598	0.9606
X2	-0.514216	-0.530310	0.000531	0.4848

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 06/18/20 Time: 10:23

Sample: 2011 2018

Periods included: 8

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 184

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5270.673	473.3328	11.13524	0.0000
X1	-1.957740	19.93481	-0.098207	0.9219
X2	-0.514216	0.065766	-7.818922	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.940453	Mean dependent var	1735.083
Adjusted R-squared	0.931464	S.D. dependent var	505.4830
S.E. of regression	132.3320	Akaike info criterion	12.73421
Sum squared resid	2784370.	Schwarz criterion	13.17102
Log likelihood	-1146.548	Hannan-Quinn criter.	12.91126
F-statistic	104.6309	Durbin-Watson stat	1.695227
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 11.

UJI LAGRANGE

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects

Null hypotheses: No effects

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided
(all others) alternatives

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	504.4780 (0.0000)	2.167732 (0.1409)	506.6457 (0.0000)
Honda	22.46059 (0.0000)	-1.472322 --	14.84094 (0.0000)
King-Wu	22.46059 (0.0000)	-1.472322 --	9.752594 (0.0000)
Standardized Honda	24.00527 (0.0000)	-1.306644 --	12.34109 (0.0000)
Standardized King-Wu	24.00527 (0.0000)	-1.306644 --	7.207729 (0.0000)
Gourierioux, et al.*	--	--	504.4780 (< 0.01)
*Mixed chi-square asymptotic critical values:			
	1%	7.289	
	5%	4.321	
	10%	2.952	

Lampiran 12.

ANALISIS DESKRIPTIF

	Y	X1	X2
Mean	1735.083	11.95652	6830.174
Median	1812.000	12.00000	6758.000
Maximum	2776.000	13.00000	8437.000
Minimum	7.250000	5.000000	5934.000
Std. Dev.	505.4830	0.934032	499.3721
Skewness	-1.547386	-2.495793	0.933719
Kurtosis	6.575368	18.34772	4.125353
Jarque-Bera	171.4333	1996.924	36.44537
Probability	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	319255.4	2200.000	1256752.
Sum Sq. Dev.	46758886	159.6522	45635170
Observations	184	184	184